

JURNAL SULUH | Vol. 1 Januari 2020

Suluh

Jurnal Pemikiran Kebudayaan & Kebangsaan

**LIMA NILAI
KEINDONESIAAN
WAJAR & PANTAS
UNTUK BANGSA**



YSNB

Rp. 30.000



Suluh diterbitkan oleh Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) dan dimaksudkan sebagai media informasi kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh YSNB dan Forum Aliansi Kebangsaan. Selain itu, juga sebagai forum pembahasan masalah kebudayaan dan kebangsaan di Indonesia, yang berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesa, dan gagasan orisinal yang kritis dan mencerahkan. Redaksi mengundang para ahli untuk menulis kebudayaan dan kebangsaan secara kreatif dan mencerahkan untuk bergabung menyampaikan gagasannya kepada masyarakat luas. Tulisan dalam Suluh tidak selalu mencerminkan pendapat YSNB. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah isi.

FOKUS

Irawan Djoko Nugroho	2	Budaya Untuk Semua
Michael Tedja	3	Akulturasi Peranakan Dapat Ditumbuhkembangkan Untuk Memperkuat Nilai Ke-Indonesia-an
Johanes Herlijanto	8	Kebangkitan China dan Pengaruhnya Bagi Indonesia Aspek Ekonomi, Politik, Budaya, dan Pembangunan Bangsa
Melly Kiong	12	Pengasuhan Berlandaskan Mindful Parenting
Anak Agung Gde Agung Widharmika	17	Gotong Royong di Era Digital Studi Kasus: Indorelawan.org
M Subhan SD	20	Keindonesian di Era Digital
Prof. Dr. Susanto Zuhdi	24	Indonesia dan Keindonesiaan: Berkemajuan dan Kebersentosaan Beberapa Catatan Atas Buku “Nilai Keindonesiaan”

ESAI

Pontjo Soetowo	27	“Membangun Budaya Bangsa Dan Nilai Keindonesiaan Demi Masa Depan Bangsa”
-----------------------	-----------	---

DIALOG

Daoed Yoesoef	32	Menciptakan Pembangunan Nasional Berbasis Budaya
----------------------	-----------	---

PERSPEKTIF

Iman Sunario	39	Lima Nilai Keindonesiaan Bagi Bangsa
---------------------	-----------	---

BEDAH BUKU

Irawan Djoko Nugroho	45	Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter Suatu Sistem Pertahanan Komplen (Pelengkap) Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta
-----------------------------	-----------	--

49 Para Penulis

Budaya Untuk Semua

Budaya hingga saat ini dianggap sebagai ranah para sastrawan. Sebagai ranah sastrawan, banyak dari pandangan mereka yang ternyata masuk dalam ranah bidang lain, sehingga pandangan tersebut menjadi kurang tepat. Misalnya saja pandangan WS Rendra terkait sejarah dalam pidato kebudayaannya yang disebut Megatruh.

WS Rendra membandingkan Inggris dengan Majapahit. Rendra menyatakan: “Pada tahun 1295 Raja Edward dari Inggris memperbaiki hak-hak parlemen. Dia mengatakan bahwa hanya parlemen yang bisa mengubah hukum. Hal ini bersamaan dengan saat akhir pemerintahan Kertanegara dari Singasari dan munculnya Majapahit dibawah pimpinan Raden Wijaya. Kedua penguasa itu, boro-boro punya parlemen, punya kitab UU sebagai landasan pemerintahannya pun tidak. Sabda raja tetap unggul di atas segala-galanya”.

Pernyataan WS Rendra yang masuk ranah sejarah selain tidak tepat juga menyesatkan. Ada 4 sejarah utama yang dihilangkan WS Rendra secara paksa.

Pertama. Majapahit merupakan negara federal dari sebuah kerajaan yang bernama Jawa (Yawapuri). Kedua. Majapahit yang merupakan kelanjutan kerajaan-kerajaan sebelumnya, merupakan kerajaan pertama di dunia yang mengembangkan sistem pemerintahan federasi. Sebagai negara federasi Majapahit telah mengenal adanya perwakilan dari negara federasi untuk membahas permasalahan negara. Perwakilan dari negara federasi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk awal parlemen. Perwakilan dari negara federasi tersebut diwakili oleh para patih dan para demung sebagaimana di catat dalam Nag. 10.2. Ketiga. Majapahit mengadopsi sistem pemerintahan aristokrasi dimana kekuasaan tidak berada hanya ditangan satu orang semata, sistem yang terbaik menurut Aristoteles di atas kerajaan dan demokrasi. Keempat. Sistem pemerintahan Majapahit menempatkan raja hanya sebagai kepala negara semata dan bukan sebagai kepala

pemerintahan. Kepala pemerintahan berada ditangan Patih yang dipilih berdasar kemampuan yang dimiliki, serta jabatan Patih tidak berlangsung turun temurun. Kelima. Sistem kerajaan Majapahit yang diikuti oleh Demak dan Pajang, memiliki sistem yang berbeda dengan Mataram. Di era Mataramlah “sabda raja tetap unggul di atas segala-galanya” dimulai. Pada era Mataram, Yawapuri berakhir.

Kenyataan tersebut, menjadikan pengkavlingan budaya sebagai ranah para sastrawan sudah seharusnya ditanggalkan. Budaya seharusnya menjadi ranah siapa saja yang memahami permasalahan yang sebenarnya. Budaya harus lebih terbuka, dan menjadi rumah bagi para pemerhatinya yang fokus terhadapnya. Budaya bukan kesenian atau ekspresi budaya, juga bukan ilmu pengetahuan yang merupakan hasil dari budaya. Sayangnya budaya Indonesia, hingga saat ini belum tersusun. Sebagai akibatnya nilai-nilai budaya yang sangat penting bagi bangsa, menjadi belum terumuskan.

Sadar akan hal tersebut, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti kemudian berinisiatif memilih nilai budaya keindonesiaan yang wajar dan pantas bagi bangsa. Nilai ini diharap dapat menjadi acuan untuk bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan bersama sesama anak bangsa dan dalam kehidupan bernegara. Nilai tersebut, dipilih dari rangkaian panjang diskusi dan diskusi terfokus selama lebih dari setahun.

Hasil dari diskusi dan diskusi terfokus yang terpilih dari yang terpilih, dihadirkan sebagai penjelas bahwa budaya adalah milik siapa saja yang memahami permasalahan yang sebenarnya, serta perlu untuk dapat segera disosialisasikan agar dalam bertindak dan bertingkah laku pada kehidupan bersama sesama anak bangsa dan dalam kehidupan bernegara, memiliki sinergi yang sama.

Irawan Djoko Nugroho

Akulturasasi Peranakan Dapat Ditumbuhkembangkan Untuk Memperkuat Nilai Ke-Indonesia-an¹



Ir. Michael Tedja, M.T.²

Abstrak

Kondisi Indonesia setelah lebih dari 70 tahun merdeka hingga saat ini masih belum terasa adanya kesatuan di semua aspek kehidupan, baik itu kehidupan secara personal, maupun di dunia kerja maupun pemerintahan.

Pernikahan antar suku prosentasenya masih sangat rendah, tentunya dengan berbagai macam alasan, baik itu secara perorangan tidak menginginkan, atau mungkin keluarga besar yang tidak mendukung. Di dunia kerja, baik itu di pemerintahan maupun di swasta, banyak pimpinan yang cenderung mencari tim kerja maupun orang kepercayaan, bukan berdasarkan kompetensi,

namun karena adanya kesamaan suku, agama, ras dan asal usul.

Jika kondisi ini terus terjadi, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dikukuhkan kembali pada tanggal 17 Agustus 1950, sulit terwujud secara cepat dan merata, sehingga untuk itu diperlukan peran serta mulai dari pemerintah pusat, para pimpinan puncak perusahaan, bahkan setiap individu, untuk dapat berpikir dan bertindak secara makro tentang bagaimana terciptanya kesatuan yang bukan hanya sebatas nama dari bentuk negara, namun juga kesatuan dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: kesatuan, kompetensi, suku, agama, ras, asal usul.

¹ Makalah disampaikan pada acara Diskusi Panel Serial Seri ke 6, Sabtu 9 Januari 2015. Tema: Membangun Budaya Bangsa dan Nilai Keindonesiaan Demi Masa Depan Bangsa. Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, Jakarta

² Ketua Umum Yayasan Komunitas Indonesia Sejati, dan Faculty Member di Teknik Arsitektur Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Pendahuluan

Kondisi bangsa dan negara kita hingga saat ini masih rentan dengan sering terjadinya gesekan kecil yang dapat dengan cepat menjadi besar hanya karena hal sepele. Gesekan itu sendiri dapat muncul dari lingkungan yang terkecil antar kampung atau antar rukun tetangga, kendati mereka memiliki status sosial yang relatif hampir setara, karena berada di lingkungan yang bertetangga.

Gesekan yang lebih besar lagi adalah dapat terjadinya pertikaian antar agama, antar suku, dan semuanya itu pasti dengan melibatkan jumlah orang yang lebih banyak dibandingkan dengan antar rukun tetangga ataupun kampung. Salah satu penyebab pertikaian itu sendiri biasanya dimulai dari adanya harkat diri yang merasa dirinya lebih dibandingkan kelompok lainnya.

Ketika pertikaian itu terjadi, mereka seolah lupa dengan adanya tonggak sejarah Sumpah Pemuda pada Kerapatan Besar Pemuda Indonesia (KBPI) II pada tanggal 28 Oktober 1928. Peserta kongres pada waktu itu berasal dari berbagai latar organisasi kepemudaan yang berbasis etnis keagamaan yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen, Jong Islamieten Bond, Katholieke Jongenlingen Bond, Sekar Rukun (Jong Sunda), Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan lain-lain.

Di antara mereka hadir juga beberapa pemuda Tionghoa seperti Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok, dan Tjio Djien Kwie sebagai pengamat, serta Kwee Thiam Hong sebagai peserta yang merupakan salah seorang wakil dari Jong Sumatranen Bond. Bahkan hadir pula pemuda dari Papua yang tergabung dalam Jong Ambon, yakni Abner Ohee dan Orpa Pallo, yang diutus oleh Sultan Tidore.³

Para peserta kongres sadar, bahwa jika mereka ingin maju, maka tidak boleh lagi berpikir dan bertindak terkotak-kotak melalui organisasi masing-masing, namun perlu memiliki visi yang lebih besar bahwa perlunya persatuan melalui: kesatuan bangsa, bangsa Indonesia; kesatuan tanah air, tanah air Indonesia; dan kesatuan bahasa,

melalui bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia.

Kesatuan bangsa yang ditulis di bagian pertama, mencerminkan adanya kesepakatan para pemuda Indonesia saat itu, bahwa masing-masing sadar untuk tidak perlu lagi memperjuangkan suku masing-masing, tidak perlu lagi berpikir dalam kotak agama masing-masing, tidak perlu berpikir dalam kotak organisasi masing-masing, tapi kesadaran bersama untuk berpikir secara makro, yakni jika ingin menjadi bangsa yang besar, perlu adanya saling menerima antar suku, antar agama, antar kelompok, agar terwujudnya kesatuan sebagai suatu bangsa, bangsa Indonesia.

Sangatlah disayangkan jika pemikiran seperti itu hingga saat ini belum sepenuhnya disadari dan dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia, masih ada beberapa oknum yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dibandingkan kepentingan bangsa.

Di samping itu masih ada juga oknum tertentu yang mendengungkan perlu dibedakannya antara hak orang asli dan orang keturunan, khususnya ketika pemilihan kepala daerah suara seperti ini makin nyaring, adanya perbedaan hak politik antara penduduk asli dengan penduduk pendatang, antara orang asli dengan orang keturunan, meskipun dari segi hukum semua dianggap setara. Kondisi seperti ini perlu segera diatasi mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota, perlu ada keterlibatan dari para pimpinan pemerintahan terkait.

Kondisi Peranakan di Indonesia

Kehadiran kaum peranakan di Indonesia tidak lepas dari sejarah kehadiran imigran Tionghoa pada awal abad ke-15 di masa pemerintahan Parameswara, ketika Laksamana Cheng Ho, utusan Kaisar Tiongkok Yongle, mengunjungi Malaka dan Jawa. Terdapat legenda bahwa di tahun 1459, Kaisar Tiongkok mengirimkan seorang putri, Hang Li Po, kepada Sultan Malaka sebagai tanda penghargaan atas penghormatannya.

Memasuki abad ke-19, terjadi juga intensifikasi arus China di Nusantara. Pendalaman penetrasi kapitalisme dan ekonomi liberal sejak pertengahan abad ke-19 mendorong peningkatan arus imigran keturunan China (selanjutnya akan dipertukarkan dengan sebutan Tionghoa), untuk dipekerjakan terutama di sector perkebunan. Pada awal abad

³ Latif, Yudi, 2014. Mata Air Keteladanan. Pancasila Dalam Perbuatan. Bandung: Mizan, halaman 276-286.

ke 19, jumlah orang keturunan Tionghoa di Jawa diperkirakan sebanyak 100.000 orang. Pada tahun 1850 sudah ada sekitar 150.000 di Jawa, dan pada tahun 1900 telah ada sekitar 277.000 orang di Jawa, dan 250.000 orang di luar Jawa.⁴

Itulah cikal bakal kehadiran orang Tionghoa di Indonesia, yang akhirnya jumlahnya dari waktu ke waktu semakin banyak, dan pada saat ini sudah menempati sebagai suku terbesar ke 3 di Indonesia setelah suku Jawa dan Sunda.

Di jaman penjajahan Belanda, kaum peranakan ini dibedakan menjadi kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pribumi, dan inilah cikal bakal timbulnya rasa iri dan kebencian kepada kaum Tionghoa, bahkan ketika kejatuhan Soekarno yang dikatakan terlalu berkiblat kepada Republik Rakyat Tiongkok, hal ini membuat rakyat menjadi makin benci kepada suku Tionghoa di Indonesia.

Di sisi lain, kelompok peranakan Indonesia merasa dirinya menjadi manusia yang serba salah, merasa menjadi korban dari hal yang tidak pernah dilakukannya, merasa dicurigai, meski mereka merasa dilahirkan di Indonesia.

Menghadapi kondisi seperti ini sudah saatnya masing-masing pihak berpikir lebih makro sesuai cita-cita para pendiri bangsa dan negara, tempat kita dilahirkan dan hidup. Untuk suku Tionghoa, tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa merasa indekos dan menumpang hidup di tanah Indonesia, namun perlu yakin bahwa semua sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, dan untuk itu perlu berpikir kontribusi apa yang bisa diberikan demi terciptanya kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Untuk yang kelompok orang Indonesia yang merasa dirinya asli, perlu berpikir sesuai apa yang dipikirkan oleh para pemuda Indonesia ketika akan menyetujui Sumpah Pemuda.

Prinsip Untuk Memperkuat Nilai Ke-Indonesia-an

1. Kita Tidak Dapat Memilih Di Mana Kita Dilahirkan

Tidak ada seorangpun dari kita yang dapat memilih di bangsa apa kita akan dilahirkan, di suku

apa kita akan dilahirkan, di negara mana kita akan dilahirkan, dan oleh keluarga dengan status sosial seperti apa kita akan dilahirkan. Sangat ironis rasanya jika hingga saat ini masih ada orang yang mempersoalkan latar belakang seorang lainnya berdasarkan hukum kelahiran, seolah-olah ada yang salah dengan keberadaan orang lainnya sebagai suatu suku atau bangsa, atau mungkin orang tersebut merasa kenyamanannya terusik dengan keberadaan orang lainnya, dan biasanya orang yang mempersoalkan tersebut merasa harkat dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang dipersoalkan.

Sri Edi Swasono dalam bukunya menulis: “.... tidak ada sukubangsa eksis tanpa sukubangsa lain. Karena sebagaimana adagium bahari untuk eksistensi adalah ‘aku ada karena kamu’ (dan sebaliknya), tidak ada sukubangsa yang orisinal, ia terbentuk oleh sukubangsa lain. Tidak ada Melayu tanpa Gayo, tidak ada Batak tanpa Minang dan seterusnya, demikian pula dalam Betawi ada Melayu, Jawa, Madura, Bali dan lainnya, begitupun sebaliknya”. *Core values* kebersamaan mewujudkan diri sebagai faktor operatif yang sarat dengan toleransi untuk memperkokoh kekolektivan.⁵

Orang yang merasa harkat dirinya lebih tinggi biasanya didasari karena berbagai faktor, antara lain:

- a. Seseorang merasa harkat dirinya lebih tinggi disebabkan dirinya sebagai orang yang nenek moyangnya memiliki tanah tempatnya berpijak. Orang seperti ini merasa dialah si pemilik tanah, sementara orang lainnya sebagai orang pendatang yang hanya sekedar menumpang hidup di tempatnya.
- b. Seseorang merasa harkat dirinya lebih tinggi, karena merasa sebagai kelompok mayoritas yang jumlahnya yang lebih banyak dibanding kelompok lainnya. Ditinjau dari segi jumlah, apabila jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kelompok lainnya, maka dapat terjadi rasa ingin menguasai kelompok lainnya. Dalam bidang politik, rasa ingin menguasai

⁴ Latif, Yudi. Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalisitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia, 2012, halaman 153

⁵ Swasono, Sri Edi. Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan, Kemandirian. Yogyakarta: Aditya Media, 2015, halaman 7.

ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara, antara lain meminta jatah jabatan ataupun kursi yang jumlahnya lebih banyak dibanding dengan jatah kelompok lainnya, semuanya itu biasa disebut dengan dasar prosentase keterwakilan.

- c. Orang tersebut merasa harkat dirinya lebih tinggi, karena merasa status pendidikan, atau status ekonominya lebih baik dibanding dengan orang lain, dan biasanya orang yang merasa status pendidikan ataupun ekonominya lebih tinggi tersebut merasa status sosialnya lebih tinggi dibanding kelompok lainnya.

Pada dasarnya tidak ada seorang manusiapun yang boleh merasa dirinya lebih tinggi dari pada orang lainnya, karena yang berhak untuk lebih tinggi harkat dan kedudukannya hanya Tuhan Yang Maha Kuasa.

2. Di Mana Bumi Dipijak, Di Situ Langit Dijunjung

Siapa pun orangnya, baik itu kaum peranakan, maupun suku yang tinggal di tempat yang bukan tempat asal sukunya berada, perlu memegang prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya setiap orang perlu dapat menghargai apapun kondisi lingkungan sekitarnya, baik itu kondisi alam, kondisi sosial masyarakatnya, maupun adat istiadat dan budaya setempat. Ketika setiap manusia dapat memegang prinsip ini, niscaya kita juga dapat menghargai budaya tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan menikmati kehidupan.

Saat ini tidak dapat dipungkiri, banyak sekolah internasional yang diijinkan beroperasi di Indonesia, dengan kurikulum yang disesuaikan dengan standar sekolah itu di negara masing-masing, termasuk tidak diajarkannya sejarah Indonesia, yang akibatnya siswa di sekolah itu lebih tahu sejarah bangsa dari negara tempat sekolah tersebut berpusat, dan sama sekali tidak pernah mendengar tentang sejarah bangsa di tempatnya dilahirkan dan dibesarkan.

Berkaitan dengan hal ini, setiap kita harusnya berpikir ulang, tentang apakah kita mau menyekolahkan anak kita di sekolah internasional yang tidak mengajarkan sejarah Indonesia, dengan dampak anak-anak akan sulit dapat mencintai

bangsa dan negara, tempatnya dilahirkan.

3. Tidak Membeda-Bedakan

Bahwa saat ini di kalangan Tionghoa atau kaum peranakan sendiripun masih ada kecenderungan untuk memilih pasangan hidup, ataupun mantu dari suku yang sama, biasanya dengan dalih agar lebih mudah untuk saling menyesuaikan dirinya. Jika di kalangan peranakan saja masih ada pemikiran sempit seperti itu, maka akan lebih sulit lagi ketika pernikahan itu bersifat antar suku, maupun antar agama.

Pembedaan itu dapat terjadi juga di lembaga pemerintahan, di perusahaan, bahkan di organisasi apapun, yang ketika seorang pimpinan akan menempatkan orang untuk posisi strategis, cenderung akan menempatkan orang kepercayaannya yang memiliki salah satu atau lebih dari kesamaan suku, agama, asal usul, ras.

Pemikiran ini harusnya sudah tidak boleh ada lagi di abad ke 21, para orang tua tidak perlu lagi menentukan dari suku apa calon mantunya, buat apa sukunya sama namun pernikahannya hanya bertahan seumur jagung. Demikian juga dengan para pimpinan, baik di pemerintahan, perusahaan swasta, maupun organisasi, sudah saatnya mencari orang berdasarkan criteria kompetensi, karena hanya dengan kompetensi yang akan membawa lembaga yang dipimpinnya dapat maju.

Kesimpulan

Kembali kepada akulturasi itu sendiri, hal tersebut akan cepat tercipta jika kelompok mayoritas dapat bersatu dengan minoritas, yang tidak hanya terbatas pada peranakan Tionghoa sebagai minoritas, namun ada banyak suku lain yang jumlahnya lebih sedikit dibanding Tionghoa peranakan. Untuk yang merasa minoritas, perlu memegang prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, sedang untuk yang merasa mayoritas, perlu menghargai adanya

perbedaan, sebagaimana para pemuda Indonesia yang mencanangkan Sumpah Pemuda.

Sebagaimana lagu Stevie Wonder, seorang penyanyi tuna netra warga negara Amerika mengatakan, yang putih dan hitam harus hidup dalam suatu harmoni, ibaratnya tuts piano, ada yang berwarna hitam, ada yang putih. Ketika

kedua warna ini dimainkan bersama, akan tercipta nada lagu yang jauh lebih indah harmoninya dibandingkan hanya memainkan tuts yang sewarna. Demikian juga segenap suku di Indonesia, mari kita sama-sama menghargai kemajemukan sebagaimana semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, justru didalam keberagaman kita menjadi kaya dan kuat.***

Daftar Pustaka

Latif, Yudi. Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia, 2012.

Latif, Yudi. *Mata Air Keteladanan*. Pancasila Dalam Perbuatan. Bandung: Mizan, 2014.

Swasono, Sri Edi. *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan, Kemandirian*. Yogyakarta: Aditya Media, 2015.



Kebangkitan China dan Pengaruhnya Bagi Indonesia Aspek Ekonomi, Politik, Budaya, dan Pembangunan Bangsa



Johanes Herlijanto, M.Si., Ph.D.

Dalam sejarah nasionalisme Indonesia, berbagai perkembangan di belahan lain di Asia selalu membawa pengaruh bagi ide pembangunan bangsa. Kaum terpelajar di Indonesia pada periode akhir masa kolonial (1900 – 1940) menaruh perhatian khusus terhadap berbagai peristiwa di atas. Kemenangan Jepang atas Rusia, yang menghapuskan mitos bahwa bangsa Eropa tidak terkalahkan, membawa inspirasi bagi para pendiri bangsa di awal abad ke-20. Demikian juga dengan modernisasi di Jepang pada dekade-dekade setelahnya.

Perjuangan kemerdekaan di Filipina juga

membawa inspirasi, bagi para tokoh nasional, khususnya menjelang tahun 1940-an. Sementara itu, pembangunan bangsa China pada pergantian abad 19 menuju abad 20 di bawah pimpinan Sun Yat Sen pun, memiliki pengaruh bagi para pendiri bangsa, khususnya wacana tentang model politik hingga kesusasteraan di Indonesia. Demikian juga dengan modernisasi RRC pada 1950-an.

Dari semua pengaruh utama pembangunan dan modernisasi RRC bagi ide pembangunan bangsa Indonesia, secara khusus dapat dikelompokkan menjadi 2 hal. Pertama. Reformasi Deng Xiaoping dan Kebangkitan China. Kedua. Kebangkitan

China Pasca Deng Xiaoping. Secara umum, ide-ide yang dapat ditangkap dari kedua hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Reformasi Deng Xiaoping dan Kebangkitan China

Fenomena kebangkitan China, yang baru muncul sejak tahun terakhir abad ke 20, sebenarnya merupakan sebuah bagian dari proses panjang yang dimulai sejak akhir abad 19. Fenomena ini didasarkan pada semangat sakit hati akibat keterpurukan peradaban China berbanding peradaban Barat. Sebuah fenomena yang berhasil dimanfaatkan oleh Sun Yat Sen, untuk membangun sebuah kesadaran baru berdasarkan konsep yang diimpor dari Barat: Bangsa (*nation*).

Menarik untuk dicatat bahwa sebelum terbentuknya ide tentang “Bangsa China,” wacana tentang ras kuning (konsep impor lainnya) terlebih dahulu telah dibangun oleh Kang Youwei. Selama satu abad kemudian, bangsa China mencanangkan proses pembentukan diri menjadi sebuah bangsa yang besar, dan berdirinya RRC harus dipahami sebagai bagian dari proses tersebut.

Setelah proses pembentukan diri tersebut, pembangunan dapat ditegakkan dan dilaksanakan. Salah satunya, melalui Reformasi Ekonomi yang dicanangkan pada awal 1980-an oleh Deng Xiaoping. Reformasi Ekonomi ini merupakan upaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada era sebelumnya, yaitu era Mao Zedong.

Reformasi dilakukan dengan memperkenalkan sistem desentralisasi pada berbagai sektor, dimana antara lain adalah pertanian dan industri, dan dilakukan secara bertahap. Pada saat bersamaan, secara bertahap pula, China membuka pintu bagi modal asing, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 tahap. Pertama. Modal dari Asia Timur (Hong Kong, Taiwan, dan Singapura) hingga 1990-an. Kedua. Modal dari Barat sejak pertengahan 1990-an. Masuknya modal asing memungkinkan China mengembangkan industri untuk produk dengan harga bersaing.

Masuknya modal dari Barat dimanfaatkan pula untuk melakukan transfer teknologi. Dengan transfer teknologi tersebut, memungkinkan China mengembangkan industri berbasis teknologi tinggi.

2. Kebangkitan China Pasca Deng Xiaoping

Pasca Deng Xiaoping, China yang telah menjadi relatif kaya, mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah regional. Untuk mengatasi ketakutan negara sekitar, maka pada era Hu Jintao, dipopulerkan sebuah slogan bahwa kebangkitan China merupakan sebuah perkembangan yang berorientasi pada kedamaian (*peaceful development*). Xi Jinping melanjutkan dengan membangun slogan The China Dream dengan harapan mencapai kemakmuran, pembaharuan bangsa (*rejuvenation of the nation*), dan kebahagiaan, melalui pembangunan yang seimbang antara kemajuan material dan budaya.

Xi selanjutnya juga meluncurkan ide “berkembang bersama”, antara lain melalui proyek *one belt one road* (Obor). Namun demikian pada saat ini, masih terdapat problem yang terus menghantui, terutama untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi dan legitimasi PKC. Sebagai akibatnya, hubungan China dengan negara-negara tetangganya tidak sepenuhnya dilihat sebagai hubungan yang positif.

Kebangkitan China dan Hubungannya Dengan Indonesia

Seiring dengan kebangkitannya menjadi negara yang besar dan kuat, China mencoba mendekati negara negara sekitar untuk menjalin pertemanan, antara lain dengan negara-negara Asean. Pendekatan China pada Indonesia dilakukan, antara lain, dengan menyediakan pinjaman lunak untuk pembangunan infrastruktur hingga 2006, sekitar 800 juta USD.

Dalam tahun-tahun terakhir ini investasi China di Indonesia meningkat, khususnya di bidang energi dan infrastruktur walau realisasi investasi tersebut masih terbilang rendah. Pada sisi budaya, “Confucius Institute” dibangun di berbagai institusi, untuk mengembangkan Bahasa Mandarin di Indonesia. Sementara itu, wacana pelayaran damai Laksamana Cheng Ho dan perannya dalam penyebaran Islam pun beredar luas di Indonesia, khususnya dekade awal tahun 2000-an.

Kebangkitan China seperti kebangkitan Asia lainnya pada masa lampau, selain membawa

pengaruh bagi ide pembangunan bangsa dan negara Indonesia, pada awalnya hingga tahun 2000-an, dipandang secara positif oleh sementara kalangan di Indonesia. Sebab kebangkitan tersebut, dipandang sebagai kebangkitan kekuatan alternatif bangsa Asia terhadap Barat.

Sementara itu, bantuan pembangunan dari China pun, yang menafikan pesan politik, juga dianggap sebagai sebuah alternatif lain selain bantuan Barat. Karena itu wajar jika kemudian, muncul wacana 'Belajar dari China' di berbagai media.

China Sebagai Sebuah Model Alternatif, Sekaligus Masalah

Secara umum, model kebangkitan dan bantuan pembangunan China yang telah dilakukannya, oleh kelompok akademisi dan intelektual di Indonesia dianggap sebagai sebuah alternatif. Karenanya, mereka memberi sambutan atasnya. Dan sambutan ini, melingkupi beberapa aspek. Salah satunya, dijadikan model negara yang menerapkan sistem pasar bebas terkontrol dan bertahap. Model ini, sangat berbeda dengan model yang dikembangkan Indonesia, karena Indonesia lebih membuka diri terhadap neoliberalisme, sehingga kurang terkontrol dan tidak bertahap.

Aspek lain adalah, dijadikannya model politik China dalam menghadapi Barat, MNC dan organisasi internasional lainnya. China bahkan dinilai memiliki kemampuan mempertahankan kemandiriannya, memiliki pergantian kepemimpinan yang nyaris tanpa gejolak, serta mampu menjaga keteraturan (*order*) di negaranya. Sebagai akibatnya maka etos kerja bangsa China kemudian dianggap perlu untuk dipelajari.

Namun demikian selepas tahun 2000-an, isu mengenai hubungan China dan negara-negara sekitar, sedikit demi sedikit muncul. Kemunculan tersebut dianggap sebagai akibat dari masalah keberlangsungan ekonomi dan legitimasi PKC di dalam negeri. Investasi China di Indonesia yang kebanyakan berupa pinjaman jangka panjang, menjadi sebuah isu hangat terkait dengan masuknya tenaga kerja tidak terlatih dari China serta kekhawatiran Indonesia terperosok di bawah pengaruh China bila tidak mampu mengembalikan pinjaman dari China. Salah satu contoh kecemasan yang ada, misalnya terkait proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Beberapa masalah lain yang muncul adalah pada aspek keamanan. Timbul keresahan terhadap tingkah laku China di kawasan sekitar Laut China Selatan. Tidak berujunginya sengketa China dengan Jepang, serta adanya insiden di kepulauan Natuna (2010, 2013, 2016).

Terakhir, masalah lain yang muncul adalah sikap China terhadap etnik China di luar China. Sikap ini kini terus dicermati negara-negara di kawasan Asia termasuk Indonesia. Sebab selama ini, peran mencolok etnik China dalam hubungan ekonomi antara China dan Indonesia, menyimpan potensi yang kurang positif.

Win-Win Solution

Meski menyimpan potensi masalah, ternyata tidak sedikit kalangan elit dan kelas menengah Indonesia dalam melihat hubungan antara China dengan Indonesia, tetap memberi pandangan positif di atas pandangan negatifnya. Mereka dengan tegas menegasi ancaman politik dari China. Hal itu dikarenakan dalam sejarah China, belum pernah dicatat melakukan ekspansi dan kolonialisasi ke Indonesia.

Sebagian pandangan lain juga menekankan bahwa kebangkitan China dapat membawa keuntungan bagi Indonesia, asalkan Indonesia dapat mengontrol atau *manage* dengan baik. Sebagaimana yang dilakukan China pada pembangunan negaranya. Investasi China dapat dirasakan untuk mendukung program pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Hanya saja untuk mengurangi masalah yang ada, maka muncul pandangan yang menghendaki agar China membangun hubungan (bisnis dan sosial) secara berimbang dengan komponen-komponen bangsa lain di Indonesia, selain etnik China. Pandangan tersebut tentu saja sangat baik. Karena itu Pemerintah Indonesia, seharusnya mampu memperkuat diri dan melakukan sistem kontrol yang lebih tegas untuk mengurangi masalah-masalah yang ada.

Guna tetap menjaga trend sisi positif yang ada, Indonesia sebaiknya mempertahankan sikap netralnya dan tetap berhati-hati terhadap upaya membenturkan Indonesia dengan China. Pembenturan hubungan antara Indonesia dan China akan berakibat saling tidak memberi manfaat. Sambil memperkuat diri, Indonesia seyogyanya mampu bermain cantik dengan

'mendayung di antara karang karang'. *Win-win solution* atas hubungan antara Indonesia dan China, seharusnya dapat diraih.

Kesimpulan

Kebangkitan China harus dipahami sebagai sebuah proses panjang pembangunan sebuah bangsa.

Kebangkitan China memiliki makna tertentu bagi bangsa Indonesia karena menunjukkan bahwa sebuah bangsa Asia dapat bangkit dan membangun sebuah negara yang besar. Indonesia pun sanggup bangkit seperti China.

Kebangkitan China dianggap sebagai sebuah kasus yang perlu dipelajari untuk menemukan model-model alternatif bagi pembangunan bangsa dan negara di Indonesia. Kebangkitan China dan segala masalah yang dihadapi negara tersebut, tidak sepenuhnya membawa dampak positif bagi Indonesia.

Untuk itu, maka Indonesia perlu menyikapinya dengan bijak. Tetap menjalin hubungan, namun untuk memperkuat diri Indonesia. Baik dari segi militer, identitas bangsa, dan budaya (keteraturan), serta membangun keterlibatan yang berimbang antara berbagai komponen bangsa.***



Pengasuhan Berlandaskan *Mindful Parenting*



Melly Kiong

Dalam salah satu kesempatan, Prof. Daoed Joesoef pernah berkata: “*Pendidikan baru akan berhasil jika ada pendidikan di persekolahan dan pendidikan di dalam rumah*”. Penjelasan tersebut menunjukkan jika seorang ibu adalah orangtua pertama sekaligus guru kedua di rumah, dan seorang guru adalah guru pertama sekaligus sebagai orangtua kedua. Peran ini tidak boleh tertukar.

Namun sungguh disayangkan, bila dalam perkembangannya yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orangtua yang tergantikan posisinya di rumah dengan orang lain (asisten rumah tangga misalnya) dan tanpa disadari, telah terjadi pergeseran nilai-nilai pendidikan dengan alasan tidak tersedianya waktu atau lainnya. Kenyataan tersebut tentu sangat disayangkan, terlebih ketika melihat perkembangan psikososial di masyarakat, serta pertumbuhan mental juang anak-anak generasi yang akan datang, menjadi memprihatinkan. Perlu dilakukan solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Karena itu, pembagian pengalaman pengasuhan berlandaskan *Mindful Parenting* kepada khalayak ramai, kiranya dapat dilaksanakan. Tentu saja

dengan praktik-praktik yang sangat sederhana dan mudah ditiru, tanpa melihat perbedaan kondisi ekonomi dan lainnya.

Sebagai seorang ibu yang kebetulan berada di area publik, kami merasakan benar jika pada saat ada kesalahan terhadap mentalitas yang dibutuhkan oleh generasi mendatang (anak-anak kini) ketika terjun ke dunia nyata. Sepertinya bekal tersebut tidak diperoleh dalam pola asuh keseharian yang dijalankan. Untuk itulah, maka kiranya beberapa praktik sederhana sehari-hari yang selama ini telah dilakukan, dapat *digetoktularkan* ke masyarakat luas.

Dimulai tahun 2007, sebuah buku kami luncurkan. Buku itu berjudul: “Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Baik? Buku tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat. Buku itu bahkan mendapat penghargaan MURI “Buku Pedoman Pendidik Anak Buat Ibu-Ibu Yang Ada di Ranah Publik”.

Bakan Jaya Suprana kala itu mengatakan jika seorang ibu bekerja di luar rumah mampu melakukan pendidikan seperti yang saya lakukan, maka seharusnya ibu-ibu yang ada di rumah dua kali lebih baik dari saya. Pernyataan tersebut tentu

saja menjadi sebuah suntikan semangat yang luar biasa. Salah satu pesannya yang menjadi memori hingga kini adalah: “Jadikan bukumu sebagai semangat untuk membantu anak negeri”.

Secara umum, harapan dari seluruh orangtua Indonesia adalah mendapat anak-anak yang berkarakter baik dan siap terjun ke masyarakat dengan bekal yang cukup. Namun sayangnya harapan tersebut belum terkoordinasi dengan baik, dan masih bersifat parsial. Perlu ada jalinan kerjasama yang mampu mewujudkan hal tersebut. Sebagai langkah awalnya, maka diputuskan untuk bekerjasama dengan pihak sekolah dengan pembagian yang jelas, dimana tugas memberikan pendidikan akademik dan kognitif adalah tugas sekolah, dan tugas seorang ibu sebagai orangtua memberikan pendidikan nilai-nilai karakter.

Sebagai praktisi yang menerapkan konsep Mindful Parenting dengan 5 dimensi penerapannya, terasa benar adanya efek yang luar biasa positif yang dapat diraih. Penerapan konsep tersebut juga demikian aplikatif, dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja.

Tabel Mindful Parenting

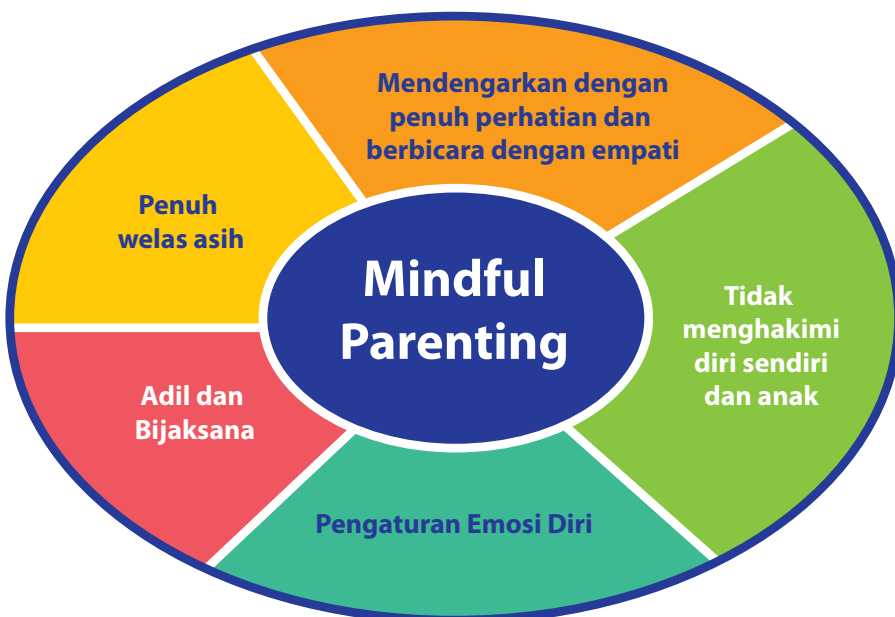
I. Penjelasan tentang *Mindful Parenting* (Mengasuh Berkesadaran)

Gambar di atas adalah pola dasar *Mindful Parenting*, frasa yang akan lebih dipopulerkan dengan padanan bahasa Indonesia “**Mengasuh Berkesadaran**”. Terkesan sedikit berbeda bahkan cenderung unik bagi banyak orang, namun setelah terbiasa menerapkan konsep ini akan membuat malu pada diri sendiri. Prinsipnya begitu mendasar, sehingga seharusnya sudah diketahui sebelum mulai mendidik anak-anak.

Kata “**Parenting**” sendiri boleh jika diartikan adalah sebagai “**pola mengasuh**”. Dimana orangtua mengasuh anak-anaknya agar bertumbuh menjadi pribadi-pribadi unggul. “**Mindful**” adalah “**berkesadaran, eling..**” atau apa saja yang mengacu pada orang yang selalu menjaga kesadarannya dari pikiran, ucapan, dan perilaku semua dari yang kurang pantas.

Selanjutnya Mengasuh Berkesadaran mengacu pada sikap, ucapan, dan perilaku serta penampilan orangtua yang mengedepankan kesadaran/eling dalam mengasuh buah hati mereka.

Tabel Mindful Parenting



Hasil dari praktik *Mindful Parenting* adalah TUR Karakter

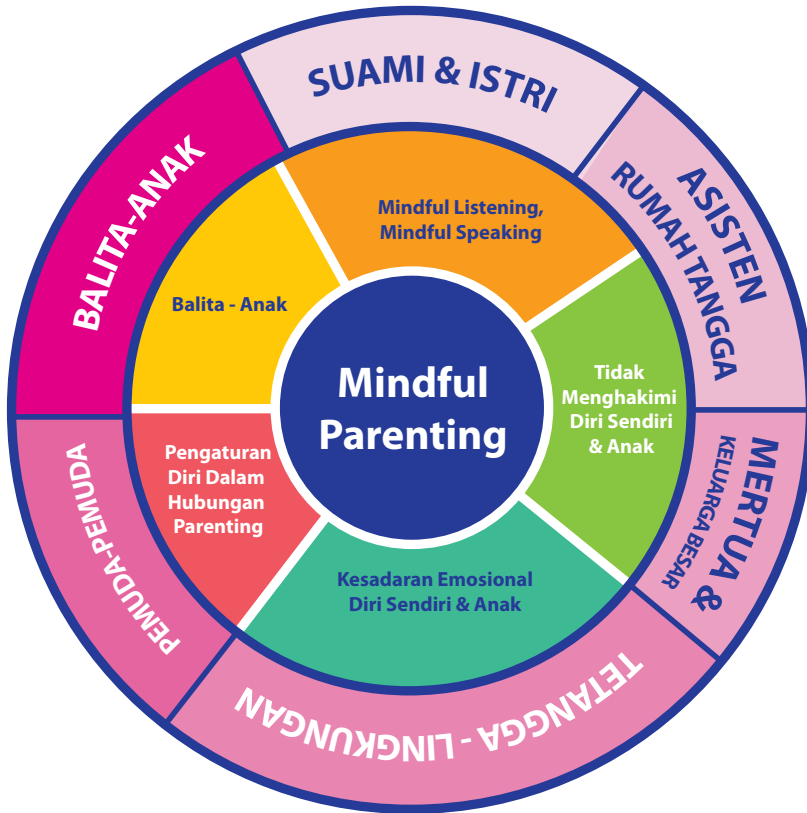
Pada awalnya, pola pemikiran sederhana dari seorang ibu dalam mendidik adalah berdasarkan pada naluri keibuan. Seiring dengan waktu, diperlukan nilai-nilai pengasuhan yang ditanamkan dengan cara membangun kebiasaan secara konsisten di rumah. Cara tersebut dirangkum dalam TUR Karakter. Dengan pembiasaan yang terus menerus, akan melahirkan karakter yang baik. Khususnya, pada perilaku disiplin, tanggung jawab, berbagi, peduli, penuh welas asih, dan lain sebagainya.

Namun demikian, tugas dan tanggung jawab pendidikan anak-anak tetap harus melibatkan banyak pihak, tidak cukup hanya ada bapak dan ibu. Tetapi juga harus melibatkan kakek, nenek, pengasuh, sekolah, bahkan lingkungan tetangga.

Beberapa buku yang sangat menunjang pendidikan keluarga kiranya perlu juga didalami. Buku-buku yang kebetulan kami tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. **Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Bahagia.**
Point utama buku dalam tersebut adalah bukan pada berapa banyaknya waktu bersama anak, melainkan bagaimana membuat waktu yang sedikit itu, menjadi bermanfaat.
2. **Cara Kreatif Mendidik Anak Ala Melly Kiong**
Point utama dalam buku tersebut, adalah bahwa mendidik anak itu sangat sederhana. Sekalipun sederhana, orangtua tetap membutuhkan kreatifitas dalam mendidik. Kreatifitas itu bisa diambil dari alam semesta.
3. **Guru-Guru Kecilnya Melly Kiong**
Point utama dalam buku tersebut adalah sangat sedikitnya orangtua yang mau belajar dari anak-anak. Untuk itu dibutuhkan kecerdasan spiritual yang baik, guna mau merendahkan hati belajar dari mereka.
4. **13 th Pernikahan Rendah Gejolak**
Point utama dalam buku tersebut adalah pernikahan yang sehat merupakan penyumbang kesehatan psikologi yang baik, bagi anak-anak di rumah.
5. **Cerdas Bersahabat dengan Mertua**
Point utama dalam buku tersebut, adalah bahwa anggapan mertua bagi sebagian besar kalangan muda adalah merupakan masalah, terjadi karena mereka banyak belum menyadari fungsi dan peran yang ada. Diperlukan pewarisan sikap baik kita terlebih dahulu secara nyata, untuk dapat dicontoh oleh semua putra-putri yang ada.
6. **Mitra Kerja Tanpa Pamrih**
Point utama dalam buku tersebut, adalah bahwa membangun hubungan yang lebih humanis dengan mitra kerja di rumah, akan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam proses mendidik.
7. **Horee Anakku Sudah Remaja**
Point utama dalam buku tersebut, adalah bahwa cara berkomunikasi dengan anak-anak dan remaja sangat berbeda. Sebagai akibatnya orang tua terutama seorang ibu perlu memahaminya, agar tidak terjadi miskomunikasi.
8. **TUR Karakter**
Point utama dalam buku tersebut, adalah bahwa pembiasaan baik yang dilakukan di keluarga, sangat membutuhkan komitmen, tindakan nyata, serta mudah dipraktikkan.

Pendidikan Keluarga



II. Pendidikan Keluarga

Selama ini, kecenderungan pemahaman dalam masyarakat luas selalu mengasumsikan bahwa pola pengasuhan dalam keluarga atau parenting hanya meliputi hubungan orangtua dan anak saja. Padahal kenyataannya di dalam sebuah keluarga, anak-anak berhubungan dengan banyak pihak antara lain dengan asisten rumah tangga, kakek-neneknya, keluarga besarnya, serta hubungannya dengan tetangga dan lingkungan sekitar.

Untuk itulah, pendidikan keluarga yang diusung dengan konsep Mindful Parenting, tetap berpedoman dengan 5 dimensi yang menjadi inti, untuk menumbuhkembangkan seluruh komponen dalam keluarga dan sekitarnya. Dimana akhirnya,

keluarga dapat menjadi tempat terbaik bagi semua pemangku kepentingan (*stake-holders*).

Dalam konsep pendidikan keluarga ala Mindful Parenting ini, semua komponen memegang peranan yang sama. Utamanya, dalam pembentukan watak, karakter dan sifat anak yang menentukan masa depan anak itu di kemudian hari.

Atas dasar itulah, maka pendidikan keluarga yang dikembangkan akan membawa anak-anak juga belajar berinteraksi dengan tetangga maupun lingkungan sekitarnya. Pendidikan keluarga ala *Mindful Parenting* sangat mengedepankan hubungan antar unsur yang lebih lengkap dalam keluarga. Hal ini karena mereka sangat

berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak.

Adapun unsur dalam pendidikan keluarga yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Suami dan Istri
2. Orangtua, mertua dan keluarga besar
3. Asisten Rumah Tangga
4. Anak
5. Remaja
6. Tetangga dan Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri, interaksi dengan semua komponen inilah yang membentuk suatu keluarga.

Semua kondisi akan mempengaruhi pendidikan dan pembentukan karakter anak yang dimulai dari rumah, lingkungan sekitar beserta orang-orang yang selalu bersama dengan anak-anak. Jadi tidak benar jika *Parenting* hanya dilihat dari sisi hubungan antara *orangtua* dengan *anak saja*, melainkan perlu sekali membangun satu kesatuan dengan pihak terkait dengan unsur yang sudah dijelaskan di atas sehingga orangtua semakin yakin bahwa pembentukan karakter terbaik akan didapatkan.**



Gotong Royong di Era Digital

Studi Kasus: Indorelawan.org



Anak Agung Gde Agung Widharmika

Gotong royong menurut KBBI berarti bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu membantu), (Tim penyusun KBBI, 2002). Gotong royong secara harfiah berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong secara umum merupakan bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai positif dari setiap obyek, permasalahan, atau kebutuhan orang-orang di sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, keterampilan, sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa kepada Tuhan.

Menurut Koentjaraningrat (1974: 60), gotong royong didefinisikan sebagai pengerahan tenaga kerja manusia tanpa bayaran untuk suatu proyek atau pekerjaan yang bermanfaat bagi umum atau yang berguna bagi pembangunan. Selain itu menurutnya kembali, budaya gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni gotong

royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Budaya gotong royong tolong menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan budaya gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, entah yang terjadi atas inisiatif warga atau gotong royong yang dipaksakan. Dengan kata lain, gotong royong tidak selamanya diberikan secara rela dan ikhlas.

Istilah gotong-royong yang berasal dari bahasa Jawa, pada saat ini menjadi ciri budaya bangsa Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Bapak Pendiri Bangsa Soekarno menjadikan gotong royong sebagai dasar negara.

Menurut Bapak Pendiri Bangsa Soekarno, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Dari lima (Pancasila) tinggal tiga, yaitu sosio nasionalisme, sosia demokrasi dan ketuhanan. Ketiga dasar ini dinamakan Trisila. Jika

tidak senang dengan angka tiga dan minta satu dasar ada kata Indonesia yang tulen yaitu gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan harus berdasarkan gotong royong dan dasar yang satu ini dinamakan Ekasila.

Gotong Royong Pada Era Saat Ini

Gotong royong pada saat ini, khususnya diperkotaan mengalami degradasi yang cukup parah. Hal ini karena komunikasi antar warga diperkotaan memiliki jarak daripada komunikasi antar warga di pedesaan. Banyak dari mereka yang bekerja pagi dan pulang petang, sehingga tidak memiliki waktu bersosialisasi dengan tetangga. Sebagai akibatnya budaya gotong royong menjadi menurun intensitasnya.

Namun demikian sebagai budaya, gotong royong tidak sepenuhnya hilang. Hanya saja dalam format bentuk baru. Jika pada masa lalu, gotong royong dapat utuh sebagai bentuk tolong menolong dan kerja bakti, maka pada saat ini bentuk gotong royong lebih banyak dalam bentuk tolong-menolong semata. Di lingkungan warga misalnya, terdapat kegiatan gotong royong tolong menolong untuk membiayai penanganan sampah rumah tangga dan keamanan wilayah secara bersama serta dana sosial kematian untuk membantu membiayai setiap ada yang meninggal di lingkungan warga. Sekalipun kedekatan secara fisik sudah terbatas oleh pekerjaan dan waktu yang sibuk, masyarakat tetap mampu bergotong royong dalam bentuk tolong menolong demi kebaikan lingkungan.

Format baru tolong menolong tersebut, pada saat ini menjadi sentral bentuk gotong royong yang ada. Sekalipun sifat tolong menolong itu, memiliki perbedaan dengan sifat tolong menolong pada masa lalu seiring dengan tiadanya kedekatan emosional yang ada, namun format baru tersebut tetap masuk dalam definisi gotong royong. Sebagaimana penjelasan Koentjaraningrat sebelumnya, gotong royong tidak selamanya diberikan secara rela dan ikhlas. Karena itu maka dapat dikatakan jika pada saat ini gotong royong budaya gotong royong tetap ada di Indonesia, sekalipun porsi kerelaan dan keikhlasan berkurang, dan lebih banyak berubah menjadi kewajiban bersama.

Gotong Royong Berdimensi Bisnis

Gotong royong yang secara harfiah dapat diartikan sebagai tolong menolong guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama sebuah pekerjaan untuk kepentingan umum, dengan minimnya interaksi masyarakat yang ada, pada era modern saat ini semakin berkembang dan berdimensi bisnis. Misalnya pekerjaan untuk kepentingan umum sebagai muara gotong royong, dilakukan bukan oleh lembaga pemerintah namun swasta, seperti misalnya upaya penghijauan atau pembuatan sarana air bersih untuk warga.

Lembaga swasta dalam melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum dilaksanakan salah satunya misalnya melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Sebagai program sosial lembaga swasta, pekerjaan yang dilakukannya untuk kepentingan umum tersebut, tidak lepas dari sisi bisnis. Sekalipun tidak memberi dampak langsung kepada bisnis utama, namun mampu mengangkat brand image lembaga yang pada akhirnya, memiliki implikasi bisnis kedepannya.

Adanya dimensi bisnis pada gotong royong pada era modern tersebut ini, maka masihkah ia dapat disebut sebagai gotong royong. Bila mengacu pada makna gotong royong awal baik yang dilakukan secara suka rela dan ikhlas ataupun tidak, tidak menunjukkan adanya dimensi bisnis. Hal ini karena umumnya gotong royong pada masa lalu berasal dari masyarakat ke masyarakat. Bukan dari sebuah lembaga swasta atau organisasi sosial ke masyarakat, sebagaimana yang ada pada saat ini. Hanya saja semangat dalam melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum antara gotong royong era modern saat ini dengan masa lalu, memiliki sisi yang sama.

Lepas dari masuk kategori gotong royong atau tidak, namun maraknya lembaga swasta atau organisasi sosial yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum sangat menarik banyak relawan di Indonesia guna aktif ikut dalam melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum. Sebagai contohnya adalah studi kasus Indorelawan. Pada tahun 2014, relawan yang bergabung sebanyak 2.070 relawan. Pada tahun 2015 meningkat pesat menjadi 10.368 relawan. Sementara itu organisasi sosial yang bergabung bersama Indorelawan

sebanyak 15 organisasi sosial. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 153 organisasi sosial.

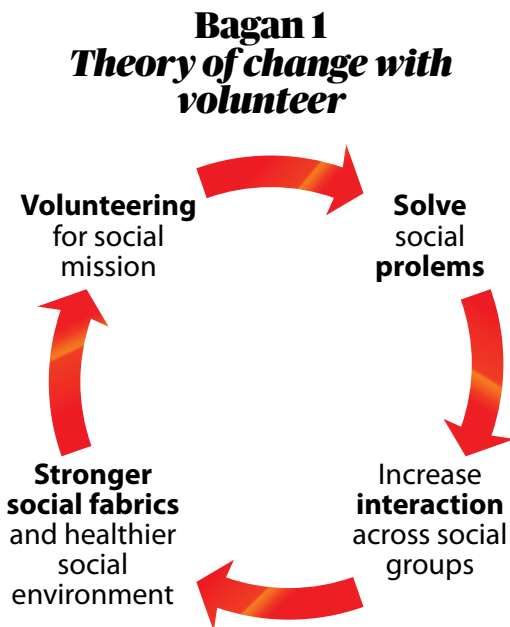
Yang dimaksud dengan relawan di sini adalah seseorang yang memiliki rasa kerelawanan kepada masyarakat sehingga mereka mau ikut serta untuk bahu-membahu dalam menolong orang lain. Dengan kata lain seseorang bisa disebut relawan jika seseorang melakukan sesuatu hal dengan sukarela, mengorbankan waktu dan tenaga, aktivitas tersebut memberikan keuntungan positif bagi lingkungan atau organisasi yang dibantunya, serta tidak atas dasar motivasi atau mengharapkan imbalan uang.

Banyaknya organisasi sosial serta relawan yang ada sebagaimana keterangan di atas, menunjukkan jika semangat gotong royong di era digital pada saat ini sebenarnya masih tetap ada dan terjaga. Walaupun tetap disadari bila semangat gotong royong yang menjadi budaya bangsa itu, kini telah mengikuti pola yang lebih baru.

Sekilas Tentang Indorelawan

Indorelawan adalah organisasi nirlaba berbentuk yayasan yang didirikan untuk membuat kolaborasi antara relawan dan komunitas dengan misi sosial menjadi lebih mudah. Indorelawan merupakan wadah berbasis web yang menghubungkan relawan dan organisasi sosial. Pendirian Indorelawan untuk menjembatani adanya realita lapangan yang menyatakan jika hanya 12% organisasi sosial memperoleh relawan yang kompeten. Dan dari 87% individu ingin menjadi relawan, hanya 42% yang melaksanakan.

Sebagai organisasi nirlaba, Indorelawan menyalurkan relawan di banyak wilayah di Indonesia. Misalnya saja Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Nilai kerja relawan tercatat hingga tahun 2015 sebesar Rp. 1.193.891.686.***



Keindonesian di Era Digital



M Subhan SD

Ada realita mencolok yang cukup mengkhawatirkan yaitu meningkatnya perbedaan-perbedaan yang menjurus ke arah konflik. Sikap intoleran terasa menguat sehingga menimbulkan polarisasi yang cukup ekstrem. Rivalitas politik bisa membuat menjadi polarisasi secara diametral. Ini menjadi ancaman bagi keberagaman bangsa Indonesia yang selalu digambarkan hidup dalam harmoni. Gejala intoleran sampai menimbulkan konflik sosial begitu marak pasca reformasi 1998.

Dalam satu dekade pasca reformasi, bangsa Indonesia terlihat “pemarah” ketika konflik begitu mudahnya meletup. Konflik kedaerahan, agama, etnis mudah tersulut. Kasus konflik sosial di Kalimantan, Ambon, Poso, Halmahera, dsb, menjadi catatan kelam dalam sejarah kontemporer negeri ini. Sepanjang satu dekade pasca reformasi, sedikitnya terekam 1.093 insiden konflik (Tadjoeddin, 2002), dan di antaranya konflik keagamaan sepanjang 1990-2008 sedikitnya tercatat 832 insiden (Ali-Fauzi dkk, 2009).

Pada akhir dekade kedua pasca reformasi ini,

sikap intoleran dan kekerasan serta diskriminatif tetap belum hilang. Walaupun dari sisi jumlah menurun, tetapi secara substantif kekerasan tersebut masih mengganggu. Tahun 2014 tercatat 158 peristiwa meskipun menurun jauh dari 245 di tahun 2013 (The Wahid Institut, 2014), termasuk yang cukup menonjol adalah sikap kebencian seperti yang terekam melalui dunia maya (media sosial). Panggung politik juga meletupkan perseteruan dan konflik. Kementerian Dalam Negeri mencatat, kekerasan dalam pilkada sejak 2005 menewaskan sedikitnya 59 orang dan melukai 230 orang; juga ada 279 rumah, 30 kantor pemerintah daerah, 11 kantor partai politik, 10 kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan berbagai jenis bangunan lain dirusak atau dibakar massa (Kompas, 28 Juni 2013).

Sekarang bangsa ini tengah berada di ujung dekade kedua pasca reformasi. Indonesia adalah “rumah besar bersama” di jantung Khatulistiwa yang dibangun dari jalinan perbedaan: etnik, ras, budaya, kedaerahan, agama, golongan, ideologi politik, dan sebagainya. Indonesia adalah sebuah

bangsa aneka warna tetapi harmoni dan bersamasama (Bhinneka Tunggal Ika). Dalam sejarah Indonesia, perbedaan dan konflik menjadi bagian dalam perjalanan bangsa. Perbedaan dan konflik sesungguhnya merupakan proses dialektis untuk menemukan atau meneguhkan rumah besar Indonesia yang mencapai titik kulminasi pada 1945. Sekarang rumah besar Indonesia ini sudah berusia 72 tahun.

Bagaimana kondisi Indonesia masa sekarang ini yang telah memasuki era digital? Hal yang tak terelakkan adalah perubahan dunia yang begitu cepat. Menurut Daoed Joesoef, Indonesia berada dalam pusaran perubahan, yang sudah terjadi adalah internasionalisasi (suatu dunia tanpa batas dan penerapan peradaban industrial Barat) dan globalisasi (bahwa rakyat semua bangsa berpartisipasi secara proaktif pada alam kemajuan teknologi-teknologi baru dan bebas memanfaatkan kemampuan teknologis tersebut di mana pun dan kapan pun), (halaman xix). Wajah paling nyata ditemukan dalam perkembangan teknologi informasi.

Saat ini internet seakan menjadi “agama baru”. Revolusi digital telah mengubah paradigma, karakter, dan kultur masyarakat. Di era digital, kemajuan penting terutama tumbuhnya semangat kemandirian antara lain di bidang ekonomi (menjamurnya usaha rintisan *startup* atau bisnis transportasi *online*) dan sosial (solidaritas). Era digital telah merevolusi cara publik berkomunikasi dan mencari informasi sekaligus sebagai ruang diskusi secara luas, terutama di kalangan generasi milenial. Revolusi digital tidak hanya membanjirnya alat-alat teknologi tetapi juga terjadi tsunami informasi. Nyaris tidak ada lagi informasi atau kabar dari pojok-pojok bumi yang tersembunyi. Dunia sudah begitu terbuka dan terang benderang, karena pertukaran informasi terjadi saat bersamaan.

Namun, revolusi digital juga paradoks. Terkadang perubahan dunia yang cepat itu menimbulkan kegamangan-kegamangan, serba salah, atau situasi yang tidak bergerak ke mana-mana. Dua dekade hampir berlalu sejak reformasi 1998, tetapi potret Indonesia hari ini ibarat panggung yang tidak pernah sepi mementaskan pergelaran yang gaduh. Pada satu sisi, era digital melahirkan konektivitas umat manusia yang membuat dunia semakin kosmopolitan, tetapi di sisi lain perilaku manusia terasa kehilangan

sentuhan kemanusiaannya.

Kasus paling aktual adalah polarisasi di dunia politik. Perbedaan dan kebencian barangkali menjadi “menu dominan” media sosial. Bisa dijejaki, misalnya, dalam pertarungan Pilpres 2014 lalu dan kini Pilkada DKI Jakarta 2017. Ujaran kebencian dan saling serang begitu vulgar. Boleh jadi, karena menurut Nemeth (2002), media sosial telah menjadi bagian *hybrid warfare*. Perang model ini bukan lagi konvensional, asimetris, dan tak lazim seperti perang-perang sebelumnya. Dalam bahasa Nemeth, *hybrid warfare* adalah perang gerilya dengan taktik militer modern dipadukan dengan teknologi internet dan telepon pintar, (Reynolds, 2016). Karena itu, penggunaan media sosial menjadi bagian penting dari strategi perang, tentu termasuk dalam pertarungan perebutan kekuasaan di Pilpres maupun Pilkada.

Pada tataran demikian, era digital bisa memburamkan demokrasi di negeri ini. *Problemnya* adalah bahwa media sosial, tidak hanya dijejali dengan komentar dan status penuh kebencian, tetapi juga diikuti dengan menyebarkan lebih banyak berita bohong atau hoax. Gosip atau berita yang belum terverifikasi lebih mudah disebarkan. Netizen justru lebih cepat dan banyak memviralkan berita-berita palsu (*fake news*). Catatan *Politica Wave*, warga digital justru lebih suka menyebarkan (share) berita-berita dari sumber-sumber abal-abal, (Rizal, 2016). Sangat sedikit yang menggunakan sumber media-media arus utama (*mainstream*) yang tingkat kepercayaannya lebih baik. Inilah dikotomi media sosial. Menurut Stupples (2015), tingkat terbaik keterhubungan publik sekarang ini adalah sebuah kekuatan, tetapi secara instan hubungan itu ditandai dengan misinformasi dan kekhawatiran yang menyebar cepat, yang pada akhirnya menimbulkan kepanikan.

Diskusi di dunia maya menjadi representasi bagi dunia nyata. Komentar negatif, ujaran kebencian, status bernada meledek di dunia maya (media sosial) membuat bangsa ini terkotak-kotak. Ini menjadi “ancaman” bangsa yang multikultur. Hal itu bisa dikonfirmasi dengan kondisi ketahanan bangsa ini. Lemhannas punya kajian tentang ketahanan nasional setiap tahun. Kajian itu mengukur ketahanan nasional yang terdiri dari tiga gatra bersifat statis (geografi, demografi, kekayaan alam) dan lima gatra bersifat dinamis (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan/hankam).

Parameter ketahanan nasional itu skalanya 1-5. Makin besar angkanya, makin baik. Sebaliknya, angka makin kecil berarti makin buruk. Lalu skala itu ditandai dengan warna-warna. Skala 1-1,8 berarti rawan (berwarna merah), skala 1,8-2,6 berarti kurang tangguh (kuning), skala 2,6-3,4 berarti cukup tangguh (hijau), skala 3,4-4,2 berarti tangguh (biru), dan skala 4,2-5 berarti sangat tangguh (ungu), (Widjojo, 2016). Nah, temuan Lemhannas menunjukkan indeks ketahanan nasional tahun 2016 hanya berskala 2,60. Artinya ketahanan nasional bangsa ini, kurang tangguh. Ada empat gatra yang kurang tangguh, yakni sumber kekayaan alam (2,56), ideologi (2,06), politik (2,43), dan sosial budaya (2,14). Untungnya, empat gatra lain terbilang cukup tangguh, yaitu geografi (2,68), demografi (2,96), ekonomi (2,73), dan hankam (3,08). Kalau dikaitkan dengan isu ideologis akhir-akhir ini, ketahanan ideologi bangsa (hanya 2,06 skalanya) berwarna kuning alias “kurang tangguh”. Maksud “kurang tangguh” berarti: 1. Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. 2. Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai TAHG. 3. Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Dan terakhir, kondisi ini disebut juga *warning*, (Lemhannas, 2016).

Hal-hal itulah yang tentunya harus menjadi perhatian semua pihak, terlebih lagi makin maraknya ideologi-ideologi radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme. Menghadapi ideologi-ideologi tersebut, sebetulnya mudah karena bangsa ini memiliki Pancasila. Pancasila adalah pondasi yang kuat untuk merekatkan bangsa ini. Sayangnya, Pancasila bernasib tidak mujur setidaknya dalam dua dekade belakangan ini. Pancasila dipandang sebelah mata. Padahal Pancasila adalah kehebatan sekaligus keunggulan bangsa ini. Pancasila adalah *way of life* bangsa Indonesia.

Pada sisi lain, bangsa dan negara ini makin rapuh karena kanker korupsi terus menjalar ke mana-mana. Eksekutif, legislatif, yudikatif, tak ada yang tahan dari rayuan korupsi. Sikap toleran, *tepa selira*, memahami orang lain, misalnya makin terkisis. Pelanggaran hukum menjadi perilaku “lumrah” termasuk di jalanan, perilaku koruptif, hingga ancaman ekstremisme. Oleh karena itu, mengikuti bahasa Yudi Latif, diperlukan

penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk untuk menangkal berjangkitnya esktrisme tersebut, (halaman 18).

Makalah kehadiran buku *Nilai Keindonesiaan: Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh* yang digagas Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini, menjadi sangat penting sebagai ikhtiar mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai keindonesiaan tidak boleh luntur, apalagi sampai lenyap. Karena nilai-nilai itu tumbuh secara alamiah sebagai identitas keindonesiaan. Bangsa-bangsa yang maju (seperti Jepang, Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan, China, (halaman 106-165) adalah bangsa yang kembali ke nilai-nilai kebangsaan mereka. Dengan membaca sejarah bangsa-bangsa tersebut, dapat diambil pelajaran untuk menentukan langkah berikutnya di masa-masa mendatang.

Pada saat yang sama, tidak boleh dilupakan kisah bangsa lain yang gagal mengelola bangsa dan negerinya. Contohnya Yugoslavia di Semenanjung Balkan. Publik tahu tentang konflik *etno-religius* di Yugoslavia. Friedman (2009) mengingatkan tentang tragedi Yugoslavia. Semenanjung Balkan telah menjadi titik api di Eropa: menjadi rute utama pergerakan imperium Romawi ke wilayah Asia dan sebaliknya menjadi jalur lintas pergerakan imperium Turki ke Eropa. Setiap imperium (bangsa) yang menaklukkan Balkan meninggalkan sebuah bangsa atau agama di jalur tersebut, dan masing-masing pihak mempunyai kebencian terhadap yang lain. Pertikaian melahirkan kekejaman, dan setiap kekejaman selalu dikenang, bukan untuk dilupakan dan dimaafkan. Yugoslavia menjadi suatu wilayah penuh konflik dari berbagai bangsa, etnis, dan agama. Namun, yang lebih menarik adalah tesis Sundhaussen, (dalam Bozic, 2012) yang menyatakan Yugoslavia tidak bubar karena serangan pihak luar, melainkan dirusak oleh berbagai kelompok di dalam negeri. Karena, saat transisi pasca runtuhnya Blok Timur, ternyata demokrasi tidak berjalan baik, sistem konstitusional tidak stabil, masyarakat sipil lemah, dan adanya manuver politikus dan elite.

Itulah kira-kira potret keindonesiaan saat ini. Dan, buku ini menjadi bekal untuk merajut kembali nilai-nilai keindonesiaan yang terserak di mana-mana. Harapannya buku ini tidak hanya menjadi bahan diskusi tetapi lebih diwujudkan dalam praksis sehari-hari. Misalnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan bergerak mendidik generasi muda – di tengah serbuan beragam

ideologi dan rayuan revolusi digital – agar tetap terpatri nilai-nilai keindonesiaan di dalam jiwa-raga mereka.**

Daftar Pustaka

- Ali-Fauzi, Ihsan, Rudy Harisyah Alam, Samsu Rizal Panggabean, 2009, *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, Laporan Penelitian Jakarta, Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF)
- Bozic, Sofija D, 2012, *History of Serbia from 19 to 21 Century of Holm Sundhaussen and Its Reception in The Serbian Scientific Community*, Institute for Recent History of Serbia
- Friedman, George, 2009, *The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century*, Doubleday, New York-London-Toronto-Sydney-Auckland.
- Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas, 2016, *Potret Ketahanan Nasional Indonesia Tahun 2016*.
- Nemeth, William, 2002, *Future war and Chechnya: a Case for Hybrid Warfare (thesis)*, Naval Postgraduate School, California.
- Reynolds, Anna, 2016, *Social Media as A Tool of Hybrid Warfare*, NATO Starategic Communications Centre of Excellence.
- Rizal, Jose, 2016, *Social Media Polarization: Fake News, SARA, Hate Speech, Intolerancy & Radicalism*, disampaikan dalam diskusi akhir tahun Kompas 2016.
- Shepherd, Jill, 2004, *What is the Digital Era?*.
- Tadjoeddin, Mohamad Zulfan, 2002, *Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia 1990-2001*
- Wahid Institute, 2014, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Berkeyakinan dan Intoleransi 2014: Utang Warisan Pemerintah Baru*.
- Widjojo, Agus, 2016, *Tantangan Ketahanan Nasional Lebih Besar dalam Transisi Demokrasi*, disampaikan dalam diskusi akhir tahun 2016 Kompas.



Indonesia dan Keindonesiaan: Berkemajuan dan Kebersentosaan Beberapa Catatan Atas Buku “Nilai Keindonesiaan”



Prof. Dr. Susanto Zuhdi¹

*“History is never only history of, it is
always history for”
(Le’vi-Strauss)*

Indonesia tidak sekedar nama, *what is in a name?* Tafsir atas ungkapan Shakespeare itu, “nama” semestinya membawa “makna”. Kata “Indonesia” sarat makna. Indonesia adalah nama yang mengandung arti suatu “tekat untuk mewujudkan sebuah cita-cita”. Indonesia berarti “kemajuan” yang digerakkan kaum muda menyongsong masa depan yang mereka yakini

akan lebih baik, daripada masa penjajahan. Dengan begitu maka Indonesia adalah masa depan yang bagi bangsa yang sentosa.

Makanya jangan mundur lagi. Pernah terdengar ada keinginan untuk mengganti saja nama “Indonesia” dengan misalnya “nusantara” atau “dipantara”, atau lainnya. Seolah-olah “Indonesia” bagi bangsa Indonesia merupakan nama yang tidak cocok. Mungkin masih ada anggapan bahwa nama yang disandang itu terlalu berat (ada istilah “keberatan” nama) begitu kata mereka yang

¹ Disampaikan dalam bedah buku Nilai Keindonesiaan di Kampus UI Depok, 5 April 2017.

masih mempercayai. Seperti pada kepercayaan sebagian orang Jawa, kalau anaknya sering “sakit-sakitan” segera mencari nama baru untuk menggantikannya misalnya menjadi “Slamet”, “Waluyo”, “Urip” atau setidaknya ditambahkan di depan nama sebelumnya.

Dengan ber“Indonesia” maka akan mampu diwujudkan cita-cita bangsa yang “berkemajuan dan sentosa bersama”. Maju tidak berarti meninggalkan nilai-nilai lama, asal mampu memberi makna baru yang relevan dengan tantangan zaman. Sentosa, tampaknya kini jarang digunakan dalam tautan berbangsa. Padahal dalam KBBI, arti kata sentosa mempunyai makna substansial dan komprehensif lebih sekedar “kuat” atau “tangguh”, yakni “bebas dari segala kesukaran dan bencana; aman dan tenteram; juga berarti “sejahtera”; kata “bersentosa” berarti “berada di dalam keadaan aman dan tenteram (sejahtera)”. “Kebersentosaan” berarti suatu karakter dari suatu kondisi atau keberadaan—dalam kaitan ini bangsa Indonesia—di dalam keadaan aman dan tenteram lagi sejahtera”

Kembali soal nama, maka disinilah relevansinya ungkapan Shakespeare tentang makna. Dalam tautan ini tidak peduli apakah nama Indonesia karena diberikan oleh orang asing (berasal dari tulisan Earl dan Logan) lalu diperkenalkan oleh Adolf Bastian. Siapapun yang pemberi makna yang penting “isi” nya (kadar; atau mutu-nya). Sebenarnya berdasar juga karena nama Indonesia dapat ditinjau dari gabungan kata: Indo (Indie) tampaknya sulit melepaskan dari pengaruh India, ketika masuknya kebudayaan dan agama Hindu. Sedangkan “nesia” dapat berasal dari “nesos”= pulau-pulau. Jadi suatu negeri dengan wilayah berupa kepulauan. Secara harafiah Indonesia berarti “pulau-pulau India” (Vlekke, Nusantara A History, 1944).

Buku yang sekarang tengah dibicarakan (Nilai Keindonesiaan, red.) sungguh relevan dengan “pemaknaan” kembali tentang “Indonesia” dan “Keindonesiaan”, karena hakikatnya mengenai “nilai”. Dalam kaitan ini seperti judul buku, maka akan ditelaah lebih dalam dan kritis mengenai “Nilai Keindonesiaan”. Nilai artinya harga (dalam arti taksiran harga); banyak sedikitnya isi; kadar; mutu. KBBI memberi contoh penggunaan “nilai budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia”. Kita menganggap sangat perlu justru

dalam kondisi bangsa seperti kehilangan orientasi.

Bagaimana kita melekatkan nilai pada Indonesia? Perspektif dan analisis sejarah diharapkan mampu menjelaskannya. Kata “indonesia” dalam arti yang hendak dilekatkan pada suatu komunitas bangsa yang hidup di wilayah yang sekarang disebut sebagai NKRI, mengalami “perjuangan” yang berat. Artinya tidak dengan serta merta. Pantas diketengahkan di sini, sepak terjang para mahasiswa masa lalu (Jawa, Sumatera, Minahasa, dsb.) sewaktu belajar di Negeri Belanda khususnya di Leiden. Mereka membentuk perhimpunan mahasiswa mula-mula namanya “Indische Vereniging” (dipimpin Gunawan Mangunkusumo, Suryomiharjo, Bagindo Dahlan Abdullah) tahun 1918, kemudian menjadi “Indonesische Vereeniging” atau “Perhimpunan Indonesia” (Mohammad Hatta 1922). Gerakan mahasiswa di Negeri Belanda (khususnya di Leiden) yang dianggap “berpolitik”, sampai pada penangkapan Mohammad Hatta, dkk., dan diajukan ke pengadilan di Den Haag. Maka Hatta berpidato dalam pembelaannya “Indonesia Vrij” (1926). “Jika bangsa Belanda mempunyai pahlawannya, Pangeran Oranye (dalam perang 80 tahun Belanda menghadapi penjajahan Spanyol); kami juga mempunyai P. Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar”, begitu Hatta dalam bagian pembelaannya.

Nilai-nilai kemajuan pada kaum perempuan (senyampang akan diperingatinya Hari Kartini 21 April ini. Ketika Kartini ditawari beasiswa oleh Abendanon untuk studi ke Negeri Belanda, ia memang menolak, tetapi dana beasiswa itu saran Kartini, hendaknya diberikan saja kepada Agus Salim. Seorang pemuda yang ketika itu dinilai sangat cerdas oleh Kartini. Bukankah sikap dan perilaku Kartini itu, merupakan (salah satu) nilai Keindonesiaan.

Keindonesiaan yang diperjuangkan tampak juga pada seorang pemuda tangguh bernama Abdul Rivai. Pahlawan nasional pertama bangsa Indonesia (1961) itu. Rivai contoh “pembawa amanah Indonesia dan nilai keindonesiaan”. Seorang yang “pantang menyerah” setelah lulus dari Sekolah Dokter Jawa ingin diakui sama dengan warga Belanda; *gelijkgesteld*, namun tidak karena kebangsawannya tapi karena prestasinya sebagai dokter yang diakui sebagai “Arts” sehingga mendapat izin berpraktik di Negeri Belanda. Sekolah di Belanda tidak dengan

beasiswa dari manapun, tetapi dengan membiayai sendiri. Setelah cukup uang dari bekerja terlebih dahulu, barulah kemudian berangkat ke Belanda.

Setelah memaparkan nilai keindonesiaan dalam gerak sejarah, di bagian ini dimaksudkan untuk menggantinya dari struktur-struktur. Dalam kerangka yang lebih luas untuk memetakan nilai-nilai Keindonesiaan seperti terungkap dalam duapuluhan judul dan beragam topik dalam buku ini (disentuh aspek ekonomi, kecuali dikaitkan dengan kehidupan sosial), digunakan kerangka pemikiran Prof. Dorodjatun: Tiga pilar bangsa menyongsong masa depan (Abad ke-21) yakni Geografi, Demografi, dan Histori. Berdasarkan kerangka itu pula, kemudian dicoba mengkategorisasikannya secara kasar terhadap sejumlah tulisan di dalam buku “Nilai Keindonesiaan”. “*Geography is our destiny*” begitu umumnya ungkapan manapun bangsa atas gambaran muka bumi dari negerinya. Geografi Indonesia memberi proses keniscayaan akan karakter yang terbentuk karena letak di antara dua samudera dan dua benua. Denys Lombard meskipun menyebut “Jawa Silang Budaya” hakikatnya berlangsung pada seluruh kepulauan. Struktur ini sudah memperlihatkan nilai-nilai yang tumbuh: keterbukaan, toleransi, berpandangan keluar (*outward looking*). “Bahari” dan “kebaharian” pun merupakan keniscayaan dalam suatu kehidupan masyarakat kepulauan.

Ir. Sukarno memaknai geografi tidak sekedar kondisi obyektif gambaran rupa bumi tetapi merupakan pengertian politik. Maka di dalam pidato 1 Juni 1945 di dalam BPUPKI, ia mengemukakan istilah “geopolitik” untuk wilayah negeri yang kelak akan merdeka. Dalam kategori ini terdapat tulisan: Daud A. Tanudirdjo (migrasi dan geografi), Yudi Latif (Pancasila), dan dengan pendekatan budaya yang kental oleh Mudji Sutrisno, dengan pendekatan psikologis oleh Sarlito Wirawan Sarwono.

Dalam aspek “demografi”, tidak ada bangsa di dunia yang seberagam penduduk yang mendiami kepulauan seperti Indonesia. Keragaman etnik, bahasa, dan kebudayaan dan secara pasti jumlah penduduk terbesar kelima di dunia merupakan karunia sumber daya manusia luar biasa. Di dalam proses-proses berinteraksi di antara masyarakat seperti itu melahirkan sikap dan didasari dari nilai-

nilai dasar yang terdapat di dalam kebudayaan yang berbeda namun “satu jua”, mengutip Mpu Tantular “*Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma mangwra*”. Bukan saja semboyan itu artinya “berbeda tapi satu jua” melainkan juga dipertegas “tidak ada perbuatan yang mendua”.

Mewakili kategori ini tulisan yang paling tegas dari Riwanto Tirtosudarmo, yang menelaah demografi dapat diarahkan untuk membentuk jiwa patriotisme, tidak lain salah satu dari nilai “keindonesiaan”. Kebijakan transmigrasi jelas bukan merupakan “kolonisasi” zaman Belanda, melainkan sebagai proses memperkuat integrasi bangsa.

Kependudukan (demografi) berbicara mengenai kondisi sosial-ekonomi yang sejahtera. Tulisan Sri Edi Swasono, Faisal Basri untuk menyebut beberapa saja. Indonesia yang merdeka bagi Sukarno adalah wadah dan ruang kehidupan yang berkeadilan sosial. Dalam masa penjajahan yang diperjuangkan itu, Sukarno menegaskannya kembali dalam pidatonya dengan istilah “*sociale rechtsvaardigheid*”. Dalam tautan ekonomi dan kesejahteraan, Mohammad Hatta menyumbang makna substansial pada perumusan Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan.

Aspek “histori”, tidak seperti pada dua aspek atau faktor pembentuk Indonesia di atas. Jika kedua faktor itu lebih lebih ajeg—untuk diproyeksikan—khususnya pada geografi, histori merupakan modal bangsa dengan penuh perhitungan. Itu karena sejarah sesungguhnya bersifat inspiratif. Melalui pilihan yang tepat atas berbagai interpretasi fakta sejarah maka makna sejarah sebagai modal bangsa, sebut di sini sebagai pembangun karakter—akan berhasil. Sejarah juga dapat dipelajari dengan analisis perbandingan dengan pengalaman bangsa lain. Beberapa tulisan dalam buku ini terdapat pengalaman bangsa: Korea, Rusia, Jepang.

Ke dalam kategori ini tulisan Risa Permanadeli menjadi statategis untuk memaknai kembali sejarah. Bangsa ini harus “waspada pada sejarah”, justru karena keliru memahaminya. Tapi lagi-lagi karena sejarah ‘hanya’ memberi bahan inspiratif, maka berpulang pada kita untuk memberi kerangka pemaknaan yang tepat bagi bangsa. ***

ESAI

“Membangun Budaya Bangsa Dan Nilai Keindonesiaan Demi Masa Depan Bangsa”



Pontjo Soetowo

Setelah dapat menyelesaikan rangkaian diskusi panel dengan tema kebudayaan maritim Indonesia dalam tahun 2014 yang lalu, Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti bersama dengan Aliansi Kebangsaan melangkah setapak lebih maju memulai sebuah Diskusi Panel Serial dengan tema besar “Membangun Budaya Bangsa dan Nilai-nilai Keindonesiaan demi Masa Depan Bangsa”.

Tema ini bukan saja sangat penting, tetapi juga sangat tepat waktu. Tema kebudayaan ini sangat penting sehubungan dengan kenyataan demikian majemuknya kebudayaan bangsa ini di tingkat daerah, dan belum tersusunnya sebuah *road map* yang mumpuni tentang arah yang akan dituju dalam membangun budaya bangsa dan nilai-nilai Keindonesiaan di masa depan. Adalah jelas diperlukan sebuah strategi kebudayaan nasional yang selain mampu memayungi dan mengembangkan seluruh kebudayaan daerah tersebut juga mampu menjadi rujukan bagi pembinaan kebudayaan nasional, yang

diamanatkan oleh Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat ini, telah terjadi kesenjangan generasi (*generation gap*) antara generasi senior yang banyak sedikitnya masih bersikap idealis dan nasionalistik, dengan generasi yang lebih junior, dengan kecenderungan pragmatism dan kosmopolitanisme yang sangat kuat. Selain itu, konflik bernuansa SARA – suku, agama, ras, dan antar golongan – masih bisa muncul setiap waktu dan di setiap tempat, tanpa diduga, seperti yang terjadi dalam kasus Tolikara di Papua pada beberapa waktu lalu.

A. Empat Catatan Kecil Tentang Kehidupan Kebudayaan

Sekedar sebagai pemicu, ada empat catatan kecil tentang kondisi kehidupan kebudayaan pada saat ini dan sebuah gagasan tentang dasar-dasar

kebijakan pembangunan budaya bangsa dan nilai keindonesiaan demi masa depan bangsa. Keempat catatan kecil tersebut adalah sebagai berikut.

Catatan Kecil Pertama

Perdebatan — atau polemik — tentang kebudayaan ini sudah pernah terjadi dalam zaman kolonial Hindia Belanda dahulu, antara Soetan Takdir Alisyahbana yang mengajak untuk berorientasi ke dunia Barat, dan Armijn Pane yang mengajak menimba ilham dari masa gemilang bangsa sendiri di masa lampau. Dewasa ini terlihat jelas bahwa pada umumnya yang menang adalah visi Soetan Takdir Alisyahbana. Hampir tidak ada bidang, dimana pengaruh Barat itu tidak dirasakan. Besar kemungkinan bahwa hal ini disebabkan oleh demikian majunya ilmu pengetahuan, teknologi, serta lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Barat yang sarat dengan visi liberalisme dan kapitalisme.

Hanya ada suatu pengecualian terhadap dominasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Barat tersebut, yaitu pada perilaku kolektif kita dalam politik dan pemerintahan, yang kelihatannya sangat sarat oleh sistem nilai dan perilaku feodal yang selain sangat bersifat personal, oligarki, patrimonial, serta sentralistik, juga kadang-kadang sangat percaya mistik, dan tentu saja sangat rentan terhadap nepotisme, kolusi, dan korupsi, di segala tingkat pemerintahan.

Hal tersebut sangat jelas terlihat pada demikian gencarnya tekanan terhadap sebuah lembaga modern era Reformasi yang selama ini sangat diharapkan untuk menjadi ujung tombak *clean and good government*, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dewasa ini sedang menghadapi tekanan berat dari kekuatan-kekuatan yang tidak menyukai keberadaannya. Syukur bahwa KPK ini mendapat dukungan kuat dari kekuatan masyarakat yang benar-benar menginginkan adanya pemerintahan Republik Indonesia yang benar-benar bersih.

Catatan Kecil Kedua

Apa yang sudah pernah diutarakan secara demikian lugas oleh Prof Dr Koentjaraningrat dan Mochtar Lubis beberapa dasawarsa yang lalu, yaitu bahwa masyarakat Indonesia mempunyai

beberapa sifat buruk, maka sifat buruk tersebut sebaiknya segera ditinggalkan. Namun dalam kenyataannya, alih-alih akan ditinggalkan, rangkaian sifat-sifat buruk tersebut malah menjadi bagian dari “kebudayaan” dewasa ini. Hal ini berarti bahwa pembinaan modal, etika, dan kerohanian yang telah ditanamkan selama ini, secara umum tidak berhasil.

Catatan Kecil Ketiga

Cukup banyak kerisauan di kalangan budayawan tentang memudarnya kearifan lokal, yang diwarisi dari kebudayaan tradisional Indonesia. Media massa — baik media cetak maupun media audio-visual — secara gencar menayangkan produk buruk budaya asing. Produk yang pada umumnya mengidolakan individualisme, konsumerisme, kekerasan, narkoba, bahkan praksis seks bebas. Produk yang secara menyeluruh telah melahirkan sebuah generasi baru yang tidak lagi mengenal semangat kebersamaan, kesederhanaan, kerakyatan, ketinggian budi, dan asketisme pribadi, yang menjadi ciri khas dari generasi para pejuang serta pendiri bangsa dan negara, yang dalam bulan ini akan berusia 70 tahun. Hal tersebut menumbuhkan kekhawatiran bahwa sebagian dari generasi baru yang telah tercerabut dari akar budayanya itu, sudah menduduki jabatan-jabatan penting dalam lembaga kemasyarakatan, partai-partai politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, yang sekarang sedang memainkan peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Catatan Kecil Keempat

Dari semuanya, adanya rekayasa kebudayaan — khususnya dalam bidang-bidang yang menjadi kepedulian bersama di atas — ternyata justru merupakan *entry point* dari apa yang dinamakan sebagai “Perang Generasi Keempat”, “Perang *Asymmetry*”, atau *war by proxy*, yaitu sebagai suatu strategi baru suatu negara kuat untuk menguasai suatu negara lain yang lebih lemah, tanpa perlu melakukan invasi militer secara terbuka. Tujuannya bukan lagi penguasaan wilayah, tetapi menguasai alam pikiran dan sumber daya alam yang dimiliki negara yang menjadi sasaran mereka.

Hal tersebut menumbuhkan kekhawatiran

bahwa justru itulah yang telah, sedang, dan akan terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya sejak tahun 1998. Karena pada kenyataannya, banyak undang-undang yang seyogyanya ditujukan untuk melayani kepentingan rakyat, justru diprakarsai oleh demikian banyak “konsultan” asing, yang telah mengakibatkan dikuasainya sumber daya alam oleh korporat multi nasional, untuk sebesar-besar keuntungan mereka. Bahkan air sebagai contohnya, yang searusnya merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, pernah secara legal dikuasai oleh korporat asing, yang tentu saja hanya mengenal keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan mereka sendiri. Meskipun kemudian, norma legal yang melanggar konstitusi tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Beberapa Pertimbangan Dalam Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Kebudayaan Nasional

Melalui pertimbangan di atas, mungkin kini diperlukan pemahaman mengenai arti kata “kebudayaan” dalam artian yang lebih luas. Atau pun pemahaman arti *culture* bahkan *civilization*, sebagai keseluruhan cara hidup yang bukan dalam arti sempit, atau sering disamakan dengan “kesenian” belaka. Dengan pengertian kebudayaan dalam artian luas tersebut, beberapa gagasan terkait masa depan kebudayaan dan nilai keindonesiaan seharusnya menjadi sebagai berikut.

Pertama. Oleh karena kenyataan paling dasar dalam kehidupan kebangsaan Indonesia adalah adanya sukubangsa (etnik) yang mempunyai latar belakang sejarah, kebudayaan, serta wawasan keahamaan yang khas, serta dihormati oleh para Pendiri Negara dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang selain tercantum dalam sesanti Lambang Negara juga tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, maka prinsip dasar dalam pembinaan kebudayaan dan nilai keindonesiaan tersebut, seharusnya adalah menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan memajukan kebudayaan daerah ini. Bagaimana pun, setiap warga lahir sebagai warga sesuatu etnik, baru kemudian, setelah mengikuti pendidikan, baik formal maupun non formal, mereka menjadi warga

negara Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.

Kedua. Sehubungan dengan adanya etnik yang jumlah warganya lumayan banyak sehingga menjadi etnik mayoritas, dan ada etnik yang jumlah warganya hanya beberapa ratus ribu orang saja sehingga menjadi etnik minoritas, maka perlu dijamin adanya kesetaraan antara berbagai etnik tersebut. Jangan sampai terjadi bahwa kebudayaan etnik mayoritas memaksakan atau mendominasi kebudayaan etnik minoritas, baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat nasional, baik melalui jalur kebudayaan atau melalui jalur hukum.

Terkait hal terakhir tersebut, pada tahun 1979 terdapat Undang-Undang Nomor 5 tentang [Desapraja], yang menyeragamkan bentuk dan sistem pemerintahan desa di seluruh desa di Indonesia dengan bentuk dan sistem pemerintahan desa di Jawa. Seperti diketahui, desa-desa di Jawa ditata berdasar asas territorial, yaitu kewilayahan, sedangkan desa-desa di luar Jawa – dengan adanya suku-suku yang memiliki hak atas tanah ulayatnya masing-masing – ditata berdasar asas territorial-genealogis. Undang-Undang tersebut pada kenyataannya ternyata telah memorakporandaan tatanan perdesaan di luar Jawa, yang sebagian di antaranya sudah tidak bisa dipulihkan lagi.

Oleh karena itu adalah merupakan suatu syarat mutlak – *conditio sine qua non* – bahwa seluruh pejabat pemerintah pusat, baik sipil maupun militer, pada bidang legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, benar-benar memahami kemajemukan kebudayaan bangsa ini. Perlu diingat, bahwa dewasa ini (berdasar data 2010) tercatat kurang lebih 1.112 buah etnik atau sukubangsa di Indonesia, sebelas buah di antaranya mempunyai warga di atas satu juta jiwa.

Hal ini berarti bahwa seluruh pejabat penyelenggara negara ini harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam bidang sosiologi, psikologi sosial, dan antropologi budaya, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah tugasnya. Akan lebih baik lagi jika mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa daerah dimana mereka bertugas. Hal ini sesungguhnya bukanlah merupakan suatu wawasan baru. Pada masa lalu, seluruh pejabat *Inlandsche Bestuur* di zaman Hindia Belanda, mampu melakukannya dengan baik. Mereka juga tidak jarang menulis monografi

tentang daerah tugasnya tersebut, yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kolonial untuk memahami kemajemukan Bangsa Indonesia.

Sekedar tambahan catatan, eksistensi etnik, dan masyarakat-hukum adat yang merupakan komponen lapangannya, bukan saja dilindungi oleh Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tetapi juga dilindungi dan dipantau oleh berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Karena itu seharusnya banyak tugas konstitusional pemerintahan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dibantu dan dilaksanakan oleh pimpinan etnik atau pimpinan masyarakat-hukum adat yang menjadi unsurnya. Hal ini sebenarnya sudah mulai dicoba kembali untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang lalu dalam rangka program kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, serta dalam rangka menanggulangi gejala pemanasan global.

Tiga Langkah Historis Dalam Perumusan-Perumusan Kebijakan Dan Strategi Kebudayaan Nasional

Jika diamati baik-baik, sesungguhnya sudah tiga kali bangsa ini mengadakan elaborasi mendalam terhadap kebijakan dan strategi kebudayaan nasional yang akan dianut dalam kebidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga langkah tersebut dilakukan secara *bottom up*. Dalam artian, tumbuh dari dialog dinamis dari para budayawan, seniman, cendekiawan, ilmuwan, dan para tokoh-tokoh masyarakat sendiri

Langkah Pertama.

Dalam menyusun sebuah strategi kebudayaan nasional, dimulai dari seluruh wacana para Pendiri Negara dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) antara bulan Mei sampai dengan Agustus 1945.

Sekalipun wacana dalam BPUPKI dan PPKI itu bermuara dalam perumusan Pembukaan, Batang

Tubuh, dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, jadi termasuk bidang hukum tatanegara, namun secara keseluruhan substansinya adalah merupakan sebuah dialog kebudayaan yang sangat bermutu. Dari sekitar 100-an anggota BPUPKI-PPKI tersebut, hanya beberapa orang saja yang berprofesi dalam bidang hukum. Selebihnya adalah tokoh masyarakat, tokoh pergerakan, guru besar, alim ulama, wartawan, pengusaha, budayawan, bangsawan, tokoh perempuan, wakil etnik Arab, Cina, dan Indo Eropa. Dengan keanekaragaman latar belakang pribadi itulah, beliau-beliau mampu membahas demikian banyak aspek *nation and state building* baik prinsip-prinsipnya, maupun bidang-bidangnya secara khusus.

Oleh karena buku risalah tersebut sudah langka di pasaran, Aliansi Kebangsaan – dengan memberitahukan Sekretariat Negara yang menerbitkannya kembali dalam tahun 1990-an – telah mencetak risalah ini dalam format yang lebih *handy*. Edisi cetak ulang ini dimaksudkan untuk keperluan pendidikan di kalangan sendiri, yang sudah tentu bisa dimanfaatkan oleh berbagai golongan dalam masyarakat yang berminat untuk mendalami wacana para Pendiri Negara itu.

Langkah Kedua.

Pada Kongres Kebudayaan Nasional pertama di Magelang tanggal 20-24 Desember 1948 (1947 ?) yang dihadiri oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, beliau menyatakan sebagai berikut.

“Pemerintahan sesuatu negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pula pada sifat pemerintahan negara. Kebudayaan lambat laun mesti sangat kuat tumbuhnya, karena kebudayaan adalah ciptaan hidup dari bangsa. ... Kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja, kita harus berusaha merobah dan memajukan, oleh karena kebudayaan sebagai culture, sebagai barang yang tumbuh, dapat hilang dan dapat maju.”

Langkah Ketiga.

Tanggal 18 Februari 1950, sewaktu sejumlah seniman dan budayawan mengumumkan apa yang dinamakan “Surat Kepercayaan Gelanggang”, mereka dengan tegas menyatakan bahwa: “Kami adalah ahli waris dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami

sendiri”.

Surat Kepercayaan Gelanggang tersebut secara sadar menempatkan kebudayaan nasional dalam konteks kebudayaan global yang berkembang secara dinamis. Dalam hubungannya dengan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, sikap dasar yang dianut bukanlah sikap yang reaktif, tetapi sikap yang pro-aktif, yang bukan hanya bersedia menerima unsur-unsur yang baik dari kebudayaan dunia luar. Tetapi juga siap untuk memberikan sumbangan yang substansial kepada kebudayaan dunia yang berkembang secara dinamis itu.

Sudah barang tentu generasi sekarang dan rangkaian generasi setelahnya, mengemban kewajiban selain untuk tetap menjaga keluhuran butir-butir mutiara pemikiran para Pendiri Negara tersebut, juga untuk memberikan jawaban kreatifnya terhadap tantangan masa kini dan tantangan masa depan yang akan dihadapi. Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti bersama Aliansi Kebangsaan dengan gembira ikut memfasilitasi wacana kontemporer dari tema besar membangun

Budaya Bangsa dan Nilai Keindonesiaan demi Masa Depan Bangsa sekarang ini.

Rasanya tidak perlu dimintakan perhatian lagi, bahwa tantangan jangka pendek yang akan dihadapi sebagai bangsa adalah persaingan bebas dengan sesama negara-negara Asean. Dimana sumber daya manusia Indonesia akan dihadapkan dengan sumber daya manusia negara-negara tersebut, yang kelihatannya telah lebih dahulu menyiapkan diri untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jika bangsa ini kalah dalam persaingan bebas tersebut, maka risikonya adalah akan ada pengangguran dan pemutusan hubungan kerja, yang sudah tentu akan mempunyai dampak pada peningkatan kriminalitas.

Semua ini menuntut kita untuk kembali meluaskan wawasan kebudayaan yang ada sebagai kompas pembangunan disertai keteguhan komitmen untuk menjalankan visi kebudayaan agar kita kembali menemukan harapan sebagai bangsa pemenang dan bukan bangsa pecundang dalam era kebangkitan Asia.**



DIALOG

Menciptakan Pembangunan Nasional Berbasis Budaya

Daod Yoesoef



Diskusi Panel Serial Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) dan Diskusi Terfokus (FGD) dengan tema 'Membangun Budaya Dan Nilai Keindonesiaan Demi Masa Depan Bangsa' memang sudah selesai. Menjadi pertanyaan kemudian, apa yang perlu dilaksanakan selanjutnya. Adalah Dr. Daod Yoesoef dengan gamblang memberikan arahan yang perlu dilakukan oleh YSNB pasca Diskusi Panel Serial dan Diskusi Terfokus.

Selain perlu segera membentuk klub-klub tercerahkan, juga perlu ikut bersama pemerintah untuk menjadikan nilai keindonesiaan yang dihasilkan, menjadi pertimbangan pembangunan. Diskusi Panel Serial dan Diskusi Terfokus juga tidak akan pernah sia-sia, sebab *time-consuming*. Berikut petikannya.

Apa yang dimaksud dengan nilai itu sebenarnya?

Kita yang selama ini berkumpul, di sponsori oleh Yayasan Suluh Nuswantara Bakti dan dorongan dari pak Pontjo, telah berhasil menemukan nilai-

nilai yang kita anggap wajar dan pantas di sebut sebagai nilai-nilai keindonesiaan. Ini berbeda dengan nilai-nilai disiplin. Kalau disiplin itu taat pada nilai-nilai adat, ketentuan dan aturan. Kalau nilai itu adalah iluminasi, pencahayaan yang begitu jelas, begitu terang sehingga tampak nyata antara garis pemisah yang membedakan antara benar dan salah. Antara keliru dan tepat, serta antara tujuan dan mencapai tujuan.

Jadi begitu jelas perbedaan itu sehingga kita dapat melangkah dengan lebih pasti. Nilai yg berupa iluminasi itu, mengandung kebajikan. Dan kebajikan itu, tidak hanya perlu di hayati tapi juga diterapkan. Karena itu, nilai-nilai yang selama

ini dalam pertemuan kita temukan, perlu untuk dirumuskan dan perlu untuk diterapkan.

Kepada siapa nilai tersebut sebenarnya harus diterapkan?

Menurut saya, memang seharusnya diterapkan ke suatu entitas yang merupakan milik kita bersama. Entitas yang merupakan penyebut. Kalau dalam matematika disebut "*our command denominator*". Dimana kita semua dengan caranya masing-masing itu, terlibat dan melibatkan diri. Entitas politik atau entitas kolektif yang merupakan *our command denominator* itu, bisa berwujud fisik

Apa wujud fisik penyebut atau *our command denominator*?

Wujud fisik *our command denominator* adalah tanah air yaitu bumi tempat kita berpijak. Jadi bumi ini bagi kita merupakan *our command denominator*. Tidak tanpa harga, dan harganya itu kalau perlu nyawa. Selama revolusi kemerdekaan telah dibuktikan. Maksim dari Suku Jawa adalah *sadumuk batuk sak nyari, bumi ditohi pati*. Jadi untuk sejangkal tanah orang bersedia mati. Karena itu *our command denominator* yang berbentuk fisik itu adalah tanah air.

Apa ada wujud lain selain bentuk fisik yaitu tanah air?

Penyebut bersama itu, juga bisa berbentuk imajiner. Dan yang berbentuk imajiner, disebut negara bangsa. Negara bangsa ini bukan lokalitas fisik, bukan hotel. Hotel sebagai lokalitas fisik, artinya untuk eksistensi hotel ini memerlukan *occupant*/penduduk. Bila hotel tanpa *occupant*, maka hotel itu tidak bisa eksis alias bangkrut.

Nah negara bangsa itu adalah suatu dalam pikiran/imajiner. Untuk eksistensinya, negara bangsa tidak memerlukan penduduk, tapi memerlukan warga negara/*citizen*. *Citizen* ini adalah alam kejiwaan.

Apa perbedaan antara penduduk dan warga negara?

Antara penduduk dengan warga negara, memiliki banyak perbedaan. Penduduk hanya

akan merasa tanah air itu dalam pengertian fisik atau formal, yaitu tempat semata. Penduduk hanya menganggap negara bangsa itu sebagai tempat untuk dilahirkan, tempat menggali kekayaan, mencari nafkah, dan *hopefully* tempat di kubur.

Tapi kalau *netizen* itu adalah suatu kejiwaan. Dalam *hymne* nasional kita Indonesia Raya, disebutkan bahwa bangsa dan tanah air itu harus dibangun jiwanya. Perlu membangun jiwanya terlebih dulu dari membangun badannya. Hanya orang yang berjiwa Indonesia, yang membentuk negara bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang selama ini kita kumpulkan. Itu adalah nilai keindonesiaan. Kita sadari atau tidak sadari, namun sebaiknya disadari bahwa kita ikut menunaikan apa yang dipesankan di dalam *hymne* Indonesia Raya.

Ada berapa nilai yang telah dikumpulkan, dan apa tujuannya dikumpulkan sebenarnya?

Nilai yang kita rumuskan selama ini, berjumlah sampai 45 nilai. Kemudian kita kategorikan ada inti atau nilai utama. Semua itu bertujuan mengukuhkan *our command denominator* yaitu negara bangsa melalui penyebaran, penghayatan nilai-nilai keindonesiaan tadi. Jadi kita perlu sebarluaskan itu, tidak hanya dicatat kemudian disimpan dalam arsip.

Bagaimana cara penyebarannya?

Caranya adalah dengan mengadakan suatu gerakan pencerahan. Itu cara penyebarannya. Suatu gerakan *enlightment movement* seperti yang pernah dilakukan di abad Pertengahan di Eropa. Supaya bertambah jelas keniscayaan penyebarluaskan nilai keindonesiaan, yang telah kita rumuskan.

Kita perlu suatu gerakan pencerahan yang dapat disebutkan bertujuan menciptakan damai ala Indonesia, jadi *Pax Indonesiana*. Kita pernah mengalami di zaman Belanda, *Pax Nirlandika*, damai ala Belanda. Nah, sekarang kita perlu melalui gerakan pencerahan menyebarkan nilai-nilai yang telah kita rumuskan itu, guna menciptakan damai ala Indonesia, *Pax Indonesiana*.

Bagaimana cara melakukannya?

Caranya dengan melakukan kerja kolektif. Suatu bangsa yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Dan kerja kolektif ini, kita sebut dengan pembangunan nasional. Apakah selama ini kita tidak mengadakan pembangunan? Iya, tetapi yang kita lakukan adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu memakai asumsi, kalau berhasil maka semua orang akan terangkat derajat kehidupannya. Jadi seperti air laut, kalau pasang naik, mengangkat semua perahu naik ke atas. Tetapi asumsi ini tidak sepenuhnya tepat. Sebab kalau air pasang, ada perahu yang terangkat ke atas, tetapi ada juga yang malah tenggelam, karena keadaan perahu tidak sama. Jadi di dalam pembangunan ekonomi itu, hanya orang-orang yang berkemampuan, ikut serta. Dan keikutsertaan itu, memberikan dia kenikmatan hidup. Tetapi yang tidak, hanya menjadi penonton. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah *spectator development*. Pembangunan tontonan karena tidak semua orang bisa ikut serta.

Dalam pembangunan ekonomi, yang dituju adalah *plus value of things*, nilai tambah benda. Karena ukuran keberhasilannya adalah GMP. Dan GMP itu, adalah jumlah total dari *plus value* benda-benda yang dihasilkan itu. Alasannya adalah pembangunan itu untuk mengisi kemerdekaan. Jadi selama ini kita seperti tertipu, namanya itu Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tetapi yang dilaksanakan adalah pembangunan ekonomi, dan itu dua hal yang berbeda.

Jadi apakah pembangunan ekonomi saat ini bukan pembangunan nasional?

Pembangunan nasional tidak identik dengan pembangunan ekonomi. Jadi kalau pun itu tidak disengaja, itu berarti sama-sama tertipulah kita. Jadi pembangunan nasional itu perlu didekati dengan cara lain, tidak didekati secara ekonomi, tetapi didekati secara budaya. Dan per definisi dapat dikatakan, budaya itu adalah sistim nilai yang kita hadapi, termasuk nilai-nilai yang selama ini kita rumuskan dalam diskusi bulanan yang disponsori oleh Yayasan yang dikembangkan oleh

pak Pontjo. Jadi pendekatannya secara budaya.

Dalam pembangunan nasional yang didekati secara budaya itu, setiap orang diikutsertakan. Caranya adalah proyek-proyek pembangunan sebagai wujud dari pembangunan itu tidak di awang-awang, terjadi di suatu lokalitas tertentu. Dan orang dilokalitas itu, harus diajak bicara. Kalau dia oleh karena pendidikannya merasa belum bisa berbicara, hak dia tidak boleh dibatalkan, dia malah dibimbing. Jadi semua orang ikut serta bicara.

Jadi kalau misalnya akan membuat waduk, maka tidak seperti yang sudah-sudah, dimana orang-orang yang tinggal disekitar waduk itu diberi uang, disuruh pergi. Tidak diajak bicara, untuk apa waduk itu sebenarnya. Demikian juga dengan pembuatan jalan tol, setiap orang dibayar disuruh pergi, tidak diajak bicara untuk apa sebetulnya jalan tol. Jadi tidak dianggap sebagai *citizen*/warga negara, tetapi dianggap sebagai penduduk.

Apakah pendekatan budaya juga tercantum dalam konstitusi kita?

Di dalam pembangunan pendekatan penduduk dengan cara pendekatan budaya itu, sebetulnya ada tersimpul dalam sila ke-4, dari Pancasila walaupun jarang disebut. Nah, kita sekarang sering menyebut Pancasila, tetapi tidak menerapkan itu. Seorang intelektual, teman dari negeri Belanda mengatakan kepada saya: “Jangan diminta orang Indonesia membicarakan Pancasila, sebab dia akan terus berbicara tanpa bisa *distop*. Sebab dengan berbicara itu, dia merasa sudah melaksanakan Pancasila.” Jadi membicarakan Pancasila itu tidak berarti melaksanakan Pancasila.

Dalam sila ke-4 dikatakan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Jadi di situ diajak musyawarah, orang yang belum bisa turut bermusyawarah ikut dibina, karena tugas negara tidak hanya pelayan, tapi juga tutor mendidik seperti didikan di sekolah-sekolah.

Mungkinkah pendidikan di sekolah mampu mengajarkan pendekatan budaya?

Gerakan pencerahan itu tentu sangat efektif, kalau dilakukan melalui sistim pendidikan nasional.

Jadi pendidikan nasional itu dijadikan bagian konstitutif. Bagian yang tak terpisahkan dari budaya, dari nilai, termasuk nilai yang selama ini kita rumuskan. Pendidikan bahkan bagian dari kebudayaan. Maka jika dipandang dari sudut itu, pendidikan adalah suatu proses yang membiasakan peserta didik sedini mungkin menggali, mengenal, mempelajari, menguasai dan menerapkan nilai-nilai yang diakui bersama berguna bagi diri pribadinya, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara dan bangsa.

Karena itu kita para pengurus lama ini, pantas sekali berusaha supaya di antara nilai-nilai yang di transmit melalui pendidikan itu, adalah nilai-nilai keindonesiaan yang selama ini telah kita rumuskan.

Jika sekolah mengajarkan nilai keindonesiaan, dapatkah ia nantinya juga berfungsi sebagai pembina karakter?

Di antara nilai-nilai keindonesiaan, terlihat ada yang bisa dipakai, disadari atau tidak disadari untuk membina karakter. Jadi tidak hanya mengembangkan intelek tapi membina karakter, dan karakter ini penting sekali. Karakter dari orang yang berjiwa Indonesia, berjiwa dalam arti menghayati nilai-nilai yang selama ini kita ikut mengembangkannya. Ada maksin di Eropa, setelah Inggris dapat memenangkan perang, dengan Napoleon I. Maksin itu mengatakan: “Inggris memenangkan perang itu di lapangan permainan sekolah *Eton* (sekolah elit).” Berarti karakter keksatriaan itu dibina di situ.

Tidak dikatakan di situ, “*England win the war at the yard of seiners* (akademi militer)”. Tetapi di lapangan, di halaman main sekolah, karakter keksatriaan itu sudah terbina melalui beberapa proyek bersama. Jadi melalui bermain, melalui penyelesaian suatu proyek bersama, anak-anak itu mau tidak mau harus mengakui orang lain sebagai pemimpin.

Nah yang saya lihat sendiri, waktu saya ke *Eton*, karena itu di tepi sungai Thames yang setiap tahun ada perlombaan perahu, mereka bersama-sama bekerja membuat perahu. Dan di dalam bekerja sama itu, mereka memilih orang yang pantas dijadikan pemimpin. Jadi mengakui kelebihan orang lain juga merupakan suatu pendidikan karakter. Cara bermain itu sendiri, juga

mengandung unsur-unsur didaktis seperti yang kalau kita dalam, lagu anak-anak di kalangan Suku Jawa kalau terang bulan. Lagu-lagu itu tidak hanya puitis, tetapi juga mengandung unsur-unsur didaktis.

Saya ingat waktu revolusi dulu, saya ber-SMA di Jogja, saya tinggal di sebelah gedung Taman Siswa tempat Ki Hajar. Di situ kalau terang bulan purnama, sudah seperti diprogramkan orang-orang datang ke situ berbicara dengan Ki Hajar. Anak-anak bermain. *Bulan bulan gedhe ana santri menek jambe*, terus *jambenya* itu jatuh ke bawah. Nah jatuh ke bawah itu menimbulkan tanda tanya, mengapa dia jatuh ke bawah. Itu yang dirumuskan oleh Newton.

Jadi nyanyi-nyayi itu adalah nyanyi yang mengandung didaktis. Dan saya ditunjukkan suatu buku oleh Ki Hajar, judulnya dalam bahasa Belanda *Deyafanse Didaktische Kinderlices*. Jadi nyanyi anak-anak yang mengandung unsur pendidikan. Tetapi buku itu judulnya memang huruf latin bahasa Belanda, tetapi isinya itu dalam tulisan-tulisan huruf Jawa yang saya tidak bisa baca. Dapat dikatakan jika penyebaran nilai-nilai yang sudah kita rumuskan itu, sangat efektif kalau melalui jalur resmi pendidikan, karena pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan sendiri adalah sistim nilai yang kita hayati, dan diantara nilai-nilai itu, kita anjurkan supaya dimasukkan, diperhitungkan di dalam pembelajaran nasional kita.

Sikap apa yang perlu diambil agar gerakan pencerahan yang dilakukan dapat berhasil?

Ada beberapa sikap yang perlu dimiliki dalam gerakan pencerahan ini. Pertama kita sendiri tentu harus konsisten. Konsisten, *integer*, sesuai perbuatan dengan perkataan. Kalau tidak kita sendiri menjadi munafik, dan bagaimana orang munafik akan menyebarkan suatu nilai yang dia sendiri sebetulnya tidak hayati. Jadi kita harus dalam hal ini konsisten, karena kita adalah penerobos nilai itu.

Bapak telah berbicara tentang nilai sekaligus budaya. Sebenarnya, apa hubungan antara nilai dengan budaya?

Nilai-nilai yang telah kita rumuskan, yang kita sebut sebagai nilai keindonesiaan, itu merupakan budaya. Sifat budaya adalah sistim nilai. Budaya sebagai sistim nilai yang dihayati itu, mengandung dua konsepsi yang komplementer. Pertama, secara obyektif budaya diartikan sebagai keseluruhan karya realisasi dan institusi, yang menentukan originalitas dan ontensitas yang hidup serumpun manusia. Kedua adalah pengaruh dampak psikologis dan spiritual dari karya tadi atas manusia sebagai kelompok kolektif dan atas manusia individual, karena akhirnya budaya itu bermuara pada manusia.

Manusia yang membuat budaya, kemudian budaya itu membesarkan manusia. Jadi manusia itu memegang peranan penting. Apalagi kalau manusia itu sudah tercerahkan seperti diharapkan dari kita semua. Disamping itu, disamping kita bertindak sesuai perbuatan dengan perkataan, kita harus juga membiasakan penggunaan nalar.

Seberapa penting penggunaan nalar bagi kita?

Nalar itu penting sekali. Dan di dalam sistim pembelajaran agama Islam, nalar itu sampai disebut 30x dalam kitab suci Alquran, sebagai wujud begitu pentingnya nalar tadi. Dalam bahasa Arab, nalar sebetulnya adalah akal. Membiasakan penggunaan nalar, diniscayakan karena dia merupakan salah satu unsur yang membentuk pola pikir masyarakat. Manusia individu mempengaruhi masyarakat, dan pola pikir masyarakat juga mempengaruhi individu.

Pola pikir masyarakat itu merupakan gabungan dari empat unsur. Pertama fakta empiris, itu membentuk pola pikir masyarakat. Yang kedua, pengertian mitologis dan religius, yang ketiga adalah ide politik dan etis. Nah, ketiga unsur ini memperbawakan *divergent*. Unsur keempat itu adalah penggunaan nalar. Jadi diantara empat unsur yang membentuk pola pikir masyarakat itu hanya satu unsur yang *konvergent*, dan masyarakat tidak akan dapat *survive* kalau penggunaan nalar itu tidak menjadi suatu kebiasaan yang dianggap wajar. Jadi itu penting sekali.

Bagaimana cara mentransmit penggunaan nalar kepada masyarakat?

Di sini tadi saya katakan pentingnya pendidikan formal, karena itu salah satu cara untuk mentransmit kebiasaan penggunaan nalar di dalam pembelajaran tertentu. Penguken penggunaan nalar itu juga dapat kita lakukan melalui kuliah, melalui pembicaraan, melalui artikel, melalui diskusi dengan mahasiswa. Jadi kita para perumus nilai keindonesiaan itu perlu untuk berdiskusi dengan orang-orang, terutama yang akan menjadi tonggak-tonggak dalam bangsa kita itu yaitu mahasiswa, supaya apa yang kita rumuskan itu menjadi titik minyak, semakin lama semakin meluas.

Karena kalau di dalam kelompok-kelompok kecil itu, kita lebih gampang mencarikan mendominator daripada kalau kelompok besar. Karena kalau di dalam matematika juga begitu, kalau unsur/pecahan yang akan digabung itu tidak banyak, lebih mudah mencari penyebutnya daripada kalau misalnya kita mencari pecahan yang lebih banyak lagi.

Ini berarti kalau diterapkan dalam cara kita selama ini berkarya, itu dicabangkan pertemuan *reboan* itu menjadi klub-klub kecil. Jadi anggota-anggota *reboan* yang selama ini disponsori oleh pak Pontjo itu membentuk sendiri disekitarnya, kelompok-kelompok kecil untuk membicarakan, mentransmit nilai-nilai keindonesiaan tadi. Jadi mencangkokkan nilai yang kita bentuk bersama dengan alam pikiran mereka. Kalau itu kita lihat di dalam praktiknya, kita bisa mencontoh, misalnya di Ambon. Misalnya kebiasaan yang sudah di lembagakan yang disebut *pela gadong*. Jadi disitu mereka bertemu sebagai orang yang setara membicarakan masalah-masalah secara damai, sehingga terjadilah kesepakatan. Walaupun masih ada perbedaan, paling sedikit kita ketahui apa dan dimana perbedaan itu.

Kalau di Minahasa, itu misalnya *mapalus*, sejenis gotong-royong yang disana juga malah dipakai untuk kerjasama mencari penjahat, menangkap maling. Dan kalau di Mandailing, itu ada disebut *godam*, jadi mereka memukul *gondang*, dan orang yang paling jauh mendengar gondang itu samarsamar, itu berarti masih terikut terundang. Jadi bunyi gondang itu merupakan undangan. Kalau kita tinggal jauh masih dengar kita sebetulnya turut diundang dan tentu diharapkan supaya hadir. Berarti bahwa bobot kebenaran itu sebetulnya sama. Jadi setiap nilai itu nilainya sama, tetapi nilai penerapannya yang tidak sama. Apa yang

dianggap benar bisa terisolasi, maka itu dianggap bukan, dan belum tentu benar ditempat lain, jadi tergantung situasi dan kondisi.

Apakah kelompok-kelompok kecil tersebut dapat efektif dilaksanakan. Maksudnya pernah berhasil dilaksanakan?

Bentuk klub-klub kecil itu, pernah dilakukan dulu oleh Hatta dan Syahrir, waktu sekembalinya dari negeri Belanda. Mereka membentuk studi klub. Cuma yang dibicarakan waktu itu bukan nilai keindonesiaan seperti yang kita bicarakan, tetapi nilai keindonesiaan dalam rangka menyiapkan orang-orang yang diharapkan berjuang untuk kemerdekaan.

Kalau Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan, maka Hatta dan Syahrir melalui kemerdekaan. Jadi di sini ada penyelesaian dari ada nilai yang disebut strategis, yaitu kalau masalah ini dapat diselesaikan maka masalah itu membuka jalan untuk memudahkan penyelesaian masalah lain. Jadi itu yang disebut pemecahan masalah yang bernilai strategis. Jadi mana yang lebih dulu, karena itu dapat meratakan yang lain.

Kalau kita lihat apa yang pernah terjadi dengan gerakan pencerahan di Eropa, juga dimulai oleh sejumlah kecil orang, tapi dilakukan secara konsisten. Jadi disini, berarti yang kecil itu ada kalanya lebih baik. *Not the mean is good, but the goodness is meaning.* Jadi perbuatan orang yang berjumlah kecil ini, karena konsisten terus menerus itu kemudian berkembang, dan bisa mencapai hasil. Tapi ini memang *time-consuming*, memerlukan waktu lama.

Jadi seperti yang pernah terjadi dalam sejarah, orang menemukan batu berlubang karena titikan air, karena terus menitik air itu, batu itu lama-lama berlubang. Padahal kalau kita lihat hampir tidak mungkin, tetesan air melubang batu, tetapi karena dia terus menerus sehingga batu itu sampai berlubang. Sehingga memang *time-consuming* tetapi perlu secara konsisten. Jadi perlu sekali disini penyebaran nilai-nilai itu dalam rangka penguatan nalar, dalam rangka penggunaan nalar di kalangan sebanyak mungkin warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain nilai keindonesiaan, apa lagi yang perlu dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa?

Saya merasa perlu mengingatkan satu hal, yaitu hukum. Sebagai istilah, itu berarti ketentuan peraturan yang harus ada, dan perlu ditaati, agar ada ketentraman dan kedamaian hidup di dalam hidup bermasyarakat, hidup bernegara dan berbangsa. Hukum sebagai istilah.

Yang saya mau kemukakan selain itu juga hukum sebagai akronim, yaitu yang terdiri dari 5 huruf. Huruf H, huruf U, huruf K, huruf U, dan huruf M. Jadi yang kita harus pegang, dan sebetulnya berdasarkan nilai-nilai yang telah kita susun itu, yaitu hukum sebagai istilah dan hukum sebagai akronim. Mengapa? Karena hukum sebagai akronim itu berarti sebagai berikut.

H: Hutan, hutan ini harus kita preservasi, sebab hutan itu bagai paru-paru yang berfungsi selaku alat pernafasan. Kemudian, hutan itu juga penting karena dia merupakan habitat dari berbagai flora dan fauna. Jadi kalau hutan itu kita babat, kita jadikan plantase kelapa sawit, dia memang masih hijau, tetapi tidak berfungsi seperti hutan.

U: Udara, kita harus jaga supaya udara itu jangan tercemar, karena udara yang tercemar itu sangat rentan dengan penyakit pilek. Dan pilek ini menyerang siapa saja, tua muda, laki-laki perempuan, pembesar dan pemulung, itu sama rentannya terhadap penyakit pilek ini. Itu gunanya udara supaya kita jaga harus tetap segar.

K: Kekayaan alam, ini adalah *natural endowment*, jadi kekayaan yang dikandung bumi yang tentu bisa kita manfaatkan. Tetapi kita generasi yang sekarang hidup memanfaatkan kekayaan alam ini, jangan menganggap itu sebagai warisan, kalau sebagai warisan tentu kita punya hak untuk menghabisi. Kita harus menanggapi kekayaan alam itu sebagai pinjaman, pinjaman generasi kita kepada anak cucu, dan sebagai pinjaman itu harus bisa dikembalikan. Tentu tidak dalam keadaan utuh, tetapi dalam kondisi yang masih bisa dimanfaatkan. Jadi kita jangan

menganggap kita pewaris, tetapi peminjam kekayaan alam, kekayaan ibu pertiwi, dari anak cucu kita yang harus kita kembalikan.

U: Unsur Air, ini maha penting karena setiap yang eksis itu memerlukan air. Bahwa air juga diperlukan untuk industrial, itu memang wajar. Tetapi hak untuk berkarya dengan menggunakan air, bukan berarti hak untuk mengotorkan air. Jadi industri yang menggunakan air sebagai bahan produksinya itu, harus bisa membuang air sama bersih dengan yang digunakannya. Jadi air itu harus tetap kita jaga supaya tetap berkualitas, dan kita mengetahui ini yang sampai sekarang, kadang-kadang masih diabaikan.

M: Membumi, memiliki tanah. Tanah ini tempat kita berpijak, sebab tanpa tanah ini kita tidak lagi menjadi suatu bangsa. Jadi tanah ini harganya nyawa, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, para pendahulu kita itu telah memberikan nyawanya, dia bayar harga tanah kita itu dengan nyawanya, *sadumuk bathuk sak nyari bumi ditohi pati*.

Jadi hukum ini sebagai istilah juga penting, sebagai akronim juga penting, karena dia merupakan hukum dasar untuk keselamatan kita, *the first basic law of our survival*. *Survival* kita itu tersebut didalam salah satu nilai yang selama ini kita rumuskan. Jadi kita semua ini masih mempunyai suatu tugas yang sebetulnya dianggap suci, *mission sacre*. Sebagai intelektual yang peduli terhadap perkembangan negara kita. Kalau kita berharap kalau bisa, negara bangsa Indonesia ini hidup sampai kiamat. Untuk bisa hidup sampai kiamat, harus kita jaga hukum. Karena hukum yang dikatakan sebagai menentukan negara kita, tidak hanya sebagai wasit pengendalian negara, tetapi hukum dalam artian mental itu adalah ketentuan minimum yang harus kita lakukan.

Kita harus berusaha dengan caranya masing-masing untuk ikut, bukan mempengaruhi. Ikut

mengatakan kepada penguasa negara kita, bahwa nilai-nilai mana yang kita anggap perlu dijalankan di suatu tempat tertentu, kemudian untuk dijadikan bagian dari perundang-undangan. Dan tidak kalah pentingnya, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan. Dan tentu saja bukan pembangunan ekonomi, namun pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pembangunan ekonomi itu penting, tapi dia merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sebab pembangunan nasional itu melibatkan semua orang termasuk yang belum berkemampuan dibina untuk mampu. Jadi tidak disisihkan. Pembangunan nasional itu tidak seperti air yang naik, kemudian mengangkat semua bersama-sama, tetapi adalah yang melibatkan semua, supaya para penduduk Indonesia itu dijadikan warga negara, diorangkan, diajak bicara, kalau belum mampu, dididik untuk bisa berbicara. Karena itu tugas kita belum selesai sebenarnya, jadi pertemuan ini masih perlu. Kita perlu membentuk kelompok-kelompok kecil, sebab dengan kelompok kecil itu kita lebih mudah mencari "*our common denominator*".

Apa harapan terhadap terhadap penyelenggaraan Diskusi Panel Serial dan Diskusi Terfokus yang selama ini dilaksanakan?

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada pak Pontjo yang selama ini menyediakan tempat dan biaya untuk yang diperlukan di kelancaran acara ini. Ini tidak akan sia-sia, karena memang dinyatakan perlu. Tetapi untuk ini perlu kesabaran karena *time-consuming*.

Kita bisa saja hilang dari permukaan bumi, tetapi ide itu tetap ada yang meneruskan perkembangan itu, jadi terus menerus ada pewaris dan ada yang menerima warisan. Dan ini nilai-nilai yang kita kembangkan sebagai nilai keindonesiaan itu, adalah penting sekali untuk eksistensi negara bangsa kita. Sekian dan terima kasih.**

PERSPEKTIF

Lima Nilai Keindonesiaan Bagi Bangsa

Iman Sunario



Budaya adalah ‘pikiran dan akal budi’ manusia atau masyarakat, yang terakumulasi dari pengalaman, dan disosialisasikan melalui pembelajaran, serta diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari satu generasi ke generasi berikutnya, (Diah Madubrangti, Maret 2016). Sementara itu, kebudayaan (culture) dan peradaban (civilization) sekalipun sama-sama menggambarkan perkembangan manusia, namun mempunyai perbedaan yang signifikan.

Budaya mengacu pada aspek spiritual, yang meliputi semua hal berkaitan dengan bahasa, ilmu pengetahuan, agama, pendidikan dan seni sebagai pengembangan pikiran. Sedangkan adab merujuk pada aspek teknologinya, yang merupakan istilah konseptual dan berkaitan secara integral pada industri, teknologi, ekonomi dan hukum, serta dibina untuk mengontrol alam guna memenuhi kebutuhan manusia, (Daoed Joesoef, Oktober 2013).

Karena itu, membangun budaya sebenarnya adalah sebuah keniscayaan, (Daoed Joesoef, Oktober 2013). Sayangnya budaya Indonesia hingga saat ini belum dirumuskan. Bahwa budaya Indonesia adalah puncak-puncak budaya daerah sebagaimana yang selama ini dipahami, ternyata memiliki pengertian yang bias. Hal ini karena budaya Indonesia selain belum dirumuskan, juga belum didukung oleh nilai – nilai penting dan fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagaimana budaya daerah.

Membangun Budaya

Di atas sekelompok teori, dibangun suatu mazhab (*school of thought*). Di atas sekelompok 'nilai', dibangun sebuah 'budaya', sebuah 'peradaban' sebagai cara baru hidup bersama di antara manusia. Mengapa nilai menjadi sangat penting, karena 'kebhinnekaan' harus mempunyai *panggung (platform)* budaya yang sama, agar masyarakat bangsa dapat saling memahami, damai dan bersatu dalam 'tunggal ika'. Atau persisnya, seperti halnya jika menggunakan logika matematika mengenai penjumlahan bilangan pecahan, maka harus 'disamakan' bilangan penyebut terlebih dahulu sebelum dapat menjumlahkannya.

Demikian analoginya, ketika ingin mengintegrasikan bangsa dalam kebhinnekaan menjadi satu kesatuan yang baru, diperlukan 'satuan penyebut bersama' (*our common denominator*), yaitu yang disebut sebagai 'negara bangsa', baik dalam artian fisik maupun mental.

Karena bangsa ini terdiri dari banyak etnis dan bermacam-macam agama, maka tidak mudah untuk menciptakan Bhinneka Tunggal Ika yang damai dan bersatu. Untuk itu diperlukan suatu 'gerakan-pencerahan' (*illumination*) yang bertujuan menanamkan nilai budaya bangsa itu. Seperti menciptakan Pax Indonesia, yaitu kedamaian ala Indonesia, sebagai prasyarat bagi pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan tujuan nasional.

Sebagai pra-kondisi, maka bangsa harus juga membiasakan menggunakan 'nalar' sebagai keniscayaan. Hal ini karena ia merupakan salah satu unsur yang membentuk pola-pikir masyarakat. Manusia individu mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya masyarakat mempengaruhi individu melalui 'interaksi'. Pola pikir itu merupakan gabungan dari empat unsur. Pertama. Fakta Empiris. Kedua. Mitologi dan religious. Ketiga. Ide politik dan etis. Keempat. Penggunaan nalar, (Dr. Daoed Joesoef, 3 Desember 2016).

Budaya dan Institusi

Reformasi telah membawa bangsa Indonesia melakukan demokratisasi tanpa kendali. Baik yang menyangkut keutuhan konstitusi, etika politik maupun konsep pengembangan ekonomi bangsa. Disamping itu kurang pekanya elite politik terhadap visi kebangsaan dan kenegaraan, menyebabkan

perubahan hanya akan menyentuh diri sendiri, jauh dari kepentingan rakyat dan bangsanya. Selain itu juga mengentalnya kepentingan elite, telah menimbulkan distorsi pada sektor publik.

Menjadi sebuah kewajaran jika kebijakan elite pemerintahan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, semakin sukar dimengerti oleh nalar intelektual bangsa di luar pemerintah. Dari hal tersebut, maka suara intelektual tidak mustahil dianggap 'merongrong' kebijakan pemerintah.

Bila diamati, maka masalah utamanya sebenarnya terletak pada belum terbentuknya 'tatanan' berbangsa yang dalam teminologi ekonomi adalah 'institusi'. Dalam hal ini, pembenahan institusi di lingkungan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia mutlak perlu dilakukan, sebab merupakan suatu kenyataan karena banyak menimbulkan anomali.

Institusi tersebut adalah aturan main dalam hubungannya dengan perekonomian, politik dan sosial. Dan yang dimaksudkan perlu adanya kelengkapan yang mengatur bentuk interaksi manusia, atau lebih lengkap lagi, adalah adanya aturan yang membentuk tingkah laku manusia pada semua area aktifitas, meliputi interaksi sosial ke transaksi ekonomi, sampai dengan kerja sama internasional, (Faisal Basri, M.A, Januari 2016).

Sesungguhnya institusi terbentuk dan berasal dari 'budaya' bangsa atau sebaliknya. Namun yang mengherankan, sejak kemerdekaan seolah belum pernah dibangun Kebudayaan Nasional. Bahkan banyak pihak mengatakan bila kebudayaan bangsa Indonesia itu belum ada, yang ada adalah budaya etnis Nusantara sebagai budaya daerah.

Untuk itu harus dapat diterima bahwa tanpa 'budaya bangsa sebagai bangsa persatuan', maka bangsa harus memiliki pimpinan bangsa yang kuat dan serba bisa, yang dalam perkembangannya cenderung 'otoriter' dan menggunakan 'penyeragaman' dalam membuat kebijaksanaan dan sekaligus membuat peraturan pelaksanaannya untuk mengatur kehidupan masyarakat bangsa di seluruh wilayah NKRI. Dan ketika tekanan globalisasi menuntut demokrasi melalui reformasi, bangsa ini menjadi belum siap dengan institusi yang disepakati oleh seluruh bangsa, karena belum memiliki 'budaya bangsa' yang kokoh.

Transformasi Budaya

Dalam kongres pertama perkumpulan Budi

Utama pada Oktober 1908, dinyatakan jika Budi Utama ikut serta dalam melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia. Cara-cara yang diambil dengan melakukan gerakan dalam kegiatan sosial, pendidikan, pengajaran, dan budaya. Pada Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia memutuskan mengaku: Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; Menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Kemudian pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bulan Agustus 1945, dikeluarkan pernyataan politik tentang tegaknya bangsa dan negara Indonesia. Namun semua kesepakatan dan kehendak itu, sesungguhnya belum terbentuk sebuah bangsa Indonesia secara budaya.

Hal ini mengakibatkan perilaku masyarakat sejak kemerdekaan sampai sekarang, belum sesuai dengan perilaku yang seharusnya. Yaitu, perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Semua pola-pikir (*mindset*) masyarakat bangsa yang ada, masih dibayang-bayangi oleh *'ego-etnisitas'* dan *'bermental budak'* sebagai masyarakat terjajah.

Untuk itu, perubahan yang fundamental harus segera terjadi demi kedaulatan bangsa dalam menghadapi masa depan. Dan semua itu hanya dapat ditanggulangi, secara budaya. Untuk itu diperlukan pemahaman *'struktur budaya'* untuk menjelaskan kaitan antara Pancasila sebagai sebuah kepercayaan dengan nilai budaya bangsa Indonesia, pembentuk perilaku.

Struktur Lapisan Budaya

Pada dasarnya, transformasi budaya dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai budaya dengan pendekatan metoda *Brainware Management System*. Dimana, Pancasila selaku kepercayaan dan keyakinan bangsa Indonesia ditempatkan sebagai inti budaya (*belief*) dan nilai budaya (*values*) pada lapisan kedua. Adapun secara keseluruhan, struktur lapisan budaya adalah sebagai berikut.

1. Kepercayaan (*belief: basic assumptions*) menempati lapisan terdalam sebagai inti budaya.
2. Nilai budaya (*values*) menempati lapisan kedua yang berfungsi menterjemahkan makna dan semangat inti budaya secara konseptual. Selanjutnya melalui proses

interaksi dengan tekanan akan perubahan, membentuk pola-pikir (*mindset*) manusianya, yang selanjutnya akan dimanifestasikan ke dalam perilaku sesuai dengan norma yang berlaku.

3. Norma (*norms*) menempati lapisan ketiga yang merupakan pembentuk perilaku masyarakat bangsa, sesuai dengan nilai budaya
4. Artifak (*artifact*) menempati lapisan keempat yang merupakan pembentuk tata lingkungan hidup, kehidupan masyarakat bangsa, ekspresi-budaya, kesusastraan, karya anak bangsa dan kesenian. Lapisan terluar ini yang banyak bersinggungan dengan pengaruh luar atau modernisasi, (*Copyright Brainware Management System*, Taufik Bahaudin, Oktober 2016).

Suatu kenyataan bahwa budaya bangsa sebagai entitas tidak bebas dari pengaruh dari luar. Baik pengaruh seperti perkembangan teknologi akibat kemajuan zaman, maupun pengaruh buruk seperti hedonisme dan penggunaan narkotika secara bebas. Pengaruh luar itu, dapat timbul perubahan pada budaya bangsa secara bertahap dari lapisan terluar sampai inti budaya. Sebaliknya kekuatan inti budaya, akan menjamin keutuhan karakter budaya bangsa atas tekanan perubahan akibat pengaruh luar itu.

Hal terpenting menjadi perhatian, adalah ketika bangsa Indonesia bersiteguh untuk mempertahankan Pancasila secara murni sebagai inti budaya, maka fungsi nilai budaya selain untuk menterjemahkan makna dan semangat dari inti budaya secara konseptual, juga berfungsi sebagai perisai dan pelindung kemurnian Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, nilai budaya bangsa Indonesia dapat tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap dalam panduan Pancasila.

Nilai Budaya Bagi Bangsa

Perkembangan budaya bangsa tidak terlepas dari kemajuan zaman. Atau perubahan budaya bangsa, dipengaruhi oleh *waktu demi kekinian* (modernisasi). Ketahanan budaya bangsa tergantung pada nilai budaya, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Kedudukan Nilai Budaya

Pengertian nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga oleh seseorang atau masyarakat, dipakai setiap hari, namun mewujudkan dalam perilaku seseorang. Nilai sebagai keyakinan mempunyai sisi *kognitif* (pengetahuan dan rasional) dan sisi *afertif* (dihayati secara emosional), dan mempengaruhi perilaku seseorang, (Romo Muji Sutrisno, Oktober 2016).

Mengacu pada Struktur Lapisan Budaya, maka nilai budaya mempunyai kedudukan strategis. Disatu pihak secara strategis adalah sebagai pembentuk budaya bangsa berdasarkan pada makna inti budaya, dan dipihak lain nilai budaya cenderung berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan modernisasi.

Ketika Pancasila ditempatkan sebagai inti budaya, yang harus dipertahankan dan tidak diubah, maka kedudukan nilai budaya tidak saja berperan sesuai dengan kedudukannya itu, tetapi juga sebagai pelindung Pancasila dari perubahan. Dengan kata lain nilai budaya bangsa Indonesia harus bebas dari nilai negatif, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan harus pula menyerap nilai positif dari modernisasi dan kemajuan zaman.

2. Pembentuk Nilai Budaya

Secara formal, pembentukan nilai budaya bangsa Indonesia harus bertolak dari konstitusi NKRI. Hal ini dikarenakan Pembukaan UUD 1945 telah dengan jelas memuat perihal berbangsa dan bernegara, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, perumusan nilai budaya bangsa Indonesia menggunakan pendekatan sebagai berikut.

- a. Bahwa nilai budaya bangsa yang bersumber pada Pancasila dan tersurat pada alenia-d Pembukaan UUD 1945, menjadi dasar negara dan sekaligus dianggap sebagai falsafah dan pendirian hidup bangsa, (Yudi Latif, Juni 2016).
- b. Bahwa kebudayaan tidak dapat lepas dari sejarah bangsa, dan merupakan transformasi budaya etnis Nusantara menjadi budaya persatuan bangsa Indonesia, (Bambang Wibawarta, April

2016).

- c. Bahwa perkembangan kebudayaan suatu bangsa, akan dinamis sesuai dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan peradaban dalam menyongsong masa depan, harus terfokus pada nilai budaya bangsa Indonesia itu.

3. Perumusan Nilai Budaya Bagi Bangsa

Seperti telah diutarakan sebelumnya, pembentukan nilai budaya bagi bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila. Nilai budaya itu kemudian disebut sebagai Nilai Keindonesiaan. Sebagai Nilai Keindonesiaan, ia harus memiliki 2 kriteria utama. Pertama, sederhana. Kedua, mudah dimengerti oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini penting, agar dalam proses penanaman nilai, dapat tersosialisasi kepada komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam merumuskan nilai budaya bagi bangsa, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti membentuk Tim Perumus telah menjangkau banyak nilai budaya yang relevan dengan pembangunan budaya bangsa Indonesia, dari seluruh diskusi dan diskusi terfokus yang diselenggarakan. Dalam diskusi, dihadirkan 32 pakar dari berbagai disiplin ilmu, sesuai dengan tema diskusi, serta diikuti oleh lebih kurang 100 peserta setiap bulannya, selama 1,5 tahun. Dalam diskusi terfokus diselenggarakan sebanyak 5 kali setelah diselesaikannya setiap tema besar diskusi. Untuk memantapkan pemahaman materi diskusi, maka dihadirkan 7 pembicara tambahan yang diambil dari pakar disiplin ilmu tertentu, serta bukan sebagai pembicara diskusi.

Guna menjadikan lebih sederhana, nilai budaya tersebut kemudian dikerujutkan ke dalam beberapa nilai utama melalui pendekatan induktif dan deduktif sebagai berikut.

A. Pendekatan Induktif

Tim Perumus dalam merumuskan Nilai Keindonesiaan secara induktif mengelompokkan nilai budaya itu

dengan mengerucutkan ke dalam gugus nilai sejenis yang disebut nilai utama (*Core values*). Upaya tersebut menghasilkan enam nilai utama, yaitu: 1. Kepribadian Pancasila. 2. Kemerdekaan Indonesia. 3. Nasionalisme. 4. Wawasan Nusantara. 5. Ilmu Pengetahuan. 6. Amanah. Hasil perumusan tersebut, kemudian dibahas dalam Diskusi Terfokus (FGD) untuk mendapatkan pengelompokan yang tepat dan sesuai dengan penalaran yang ada.

B. Pendekatan Deduktif

Pendekatan ini mengikuti pandangan dua tokoh yang menganggap perlu segera dirumuskannya nilai budaya bangsa. Yaitu, Dr. Daoed Joesoef dan Prof. Dr. Bambang Wibawarta. Menurut mereka, secara *deduktif* Nilai Keindonesiaan hendaknya adalah sebagai berikut.

- a. Dr. Daoed Joesoef ketika membacakan makalahnya pada pembukaan DPS pada tanggal 1 Agustus 2015, melampirkan makalah yang ditulisnya pada tanggal 18 Mei 2013, mengenai *Mewujudkan Nilai Keindonesiaan*. Ia berpendapat bahwa terdapat 10 Nilai Keindonesiaan yang wajar dan pantas bagi bangsa, yaitu:
 1. Nasionalisme.
 2. Persatuan Indonesia.
 3. Nalar.
 4. Kedaulatan Nasional.
 5. Kemanusiaan.
 6. Kesetaraan.
 7. Keadilan.
 8. Kebebasan.
 9. Kerakyatan.
 10. Negara Maritim.
- b. Prof. Dr. Bambang Wibawarta, Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, dalam makalah berjudul *Daya Saing dan Peran Budaya* pada DPS Seri 10 pada 30 April 2016, berpendapat bahwa cukup hanya ada 4 nilai budaya utama yang perlu dikembangkan, yaitu :
 1. Kebangsaan.
 2. Budaya Unggul (*Exellence*).
 3. Kemandirian.
 4. Gotong Royong.

4. Nilai Keindonesiaan

Setelah mempertimbangkan kedua

pendekatan tersebut, maka Tim Perumus kemudian menetapkan Nilai Keindonesiaan yang terdiri dari 5 nilai utama dan 45 nilai budaya. Yang dimaksud dengan Nilai Keindonesiaan disini adalah sebuah sistem nilai yang terpadu dimana terdapat keterkaitan yang kompleks antara nilai budaya pada nilai utama yang satu dengan nilai budaya pada nilai utama yang lain. Nilai Keindonesiaan tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Kebangsaan

Nilai utama ini menyangkut *eksistensi Indonesia* sebagai bangsa dan negara, didukung oleh nilai budaya:

1. Kebangsaan.
2. Nasionalisme.
3. Patriotisme.
4. Bhineka Tunggal Ika.
5. Kerakyatan.
6. Setara.
7. Musyawarah.
8. Institusi.
9. Ketahanan Bangsa.
10. Institusi.

2. Budaya Unggul

Nilai utama ini menyangkut *kualitas manusia* Indonesia masa depan agar sejajar dengan bangsa lain, didukung oleh nilai budaya:

11. Unggul.
12. Kepulauan.
13. Nalar.
14. Prakarsa.
15. Inovasi.
16. Wirausaha.
17. Iptek.
18. Riset.
19. Daya Juang.
20. Daya Saing.

3. Mandiri

Nilai utama ini menyangkut *sikap mental* kemandirian manusia bangsa, untuk menolak ketergantungan, didukung oleh nilai budaya:

21. Mandiri.
22. Daulat.
23. Disiplin.
24. Integritas.
25. Satria.
26. Tanggung Jawab.
27. Konsekuen.
28. Berkepribadian.
29. Teladan.

4. Gotong Royong

Nilai utama ini menyangkut *etos kebangsaan* dalam berkarya, didukung oleh nilai budaya:

30. Gotong Royong.
31. Sikap Melayani.
32. Kerja Keras.
33. Peduli.
34. Kolektif.
35. Kolaboratif.
36. Kooperatif.

5. Amanah

Nilai utama ini menyangkut *kepribadian* bangsa Indonesia, yang didukung oleh nilai budaya: 37. Amanah. 38. Nurani. 39. Adil. 40. Religius. 41. Spiritual. 42. Filantropis. 43. Humanis. 44. Jujur. 45. Hormat.

Lima Nilai Keindonesiaan tersebut, dapat dikatakan merupakan sumbangsih Yayasan Suluh Nuswantara Bakti kepada bangsa. Lima Nilai Keindonesiaan itu seyogyanya dapat merasuk ke dalam sanubari dan menjadi keyakinan bangsa serta menjadi karakter bangsa Indonesia ke depan. ☐

Daftar Pustaka

1. Bambang Wibawarta, *Daya Saing Dan Peran Kebudayaan*, Diskusi Panel Serial Yayasan Suluh Nusantara Bakti, Jakarta, 30 April 2016.
2. Daoed Joesoef, *Mewujudkan Nilai Ke-Indonesia-an*, Diskusi Panel Serial Yayasan Suluh Nusantara Bakti, Jakarta, 18 Mei 2013.
3. Diah Madubrangti, *Aktualisasi Nilai Budaya Jepang dan Pelajaran Bagi Indonesia*, Diskusi Panel Serial Yayasan Suluh Nusantara Bakti, Jakarta, Maret 2016.
4. Faisal Basri, *Memperkokoh Institusi untuk Memajukan Perekonomian*, Diskusi Panel Serial Yayasan Suluh Nusantara Bakti, Jakarta, 5 Desember 2015.
5. Muji Sutrisno, *Rumah Makna*, Diskusi Panel Serial Yayasan Suluh Nusantara Bakti, Jakarta, 3 Oktober 2015.
6. Taufik Bahaudin, Oktober 2016.
7. Yudi Latif, *Relevansi Pancasila Dalam Hidup Kekinian*, Materi DPS YSNB, Diskusi Panel Serial Yayasan Suluh Nusantara Bakti, Jakarta, Juni 2016.



BEDAH BUKU



Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta

Pengarang: Suryanto Suryokusumo, I.G.K. Manila, dkk. Editor: Suryanto Suryokusumo. Penerbit, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2016.

Irawan Djoko Nugroho



Buku Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter merupakan sebuah sumbangan pemikiran Alumni AMN Angkatan 64 Panorama-Tidar Bhakti, sebuah kelompok diskusi Alumni AMN 64 “Cinta Negeri”. Buku ini membahas sistem pertahanan nonmiliter, suatu sistem pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter, yang dilakukan oleh masyarakat sipil dengan cara sipil dan bertumpu pada aksi nonkekerasan. Buku ini sangat bagus, karena memberi informasi bahwa ancaman musuh tidak hanya datang dari militer.

Buku yang disusun dalam 7 BAB ini, juga memberi informasi yang sangat luas. Contoh-contoh dari dalam dan luar negeri dihadirkan secara melimpah untuk mendukung pemaparan yang diberikan. Selain itu, juga memberikan informasi cara mengelola kekuatan nonmiliter dari kacamata militer, sehingga arahnya menjadi semakin tegas, terutama garis pemisah antara musuh dan sekutu.

Namun demikian, buku ini juga perlu mendapat catatan. Minimal dalam dua hal. Misalnya adanya pembalikan logika dan adanya data yang perlu

diluruskan.

1. Adanya Pembalikan Logika

Jika melihat judul buku yang ditulis para ahli militer alumni AMN Angkatan 64 ini, sangat jelas jika logika yang digunakan adalah logika militer. Judul ‘Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter Suatu Sistem Pertahanan Komplemen (baca: Pelengkap) Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta’ dengan sangat jelas menyebutkan Sistem Pertahanan Nonmiliter hanya pelengkap

Sistem Pertahanan Militer. Konsep ini kiranya merupakan kelanjutan pandangan sistem yang dilaksanakan Orde Baru.

Dalam sejarahnya, Indonesia didirikan oleh nonmiliter serta dengan konsep awal menggunakan sistem pertahanan nonmiliter. BPUPKI dan kemudian PPKI serta saat diproklamasikan oleh Sukarno dan Muhammad Hatta, tidak menerapkan sistem pertahanan militer. Bahkan setelah pakar militer Oerip Soemohardjo saat itu mengkritik kebijakan tersebut, dengan pernyataannya yang melegenda 'Aneh Negara *Zonder* Tentara', pemerintah kala itu juga masih tetap menerapkan sistem pertahanan nonmiliter. Pemerintah hanya mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sebuah intitusi yang menjadikan sistem pertahanan militer sebagai pelengkap sistem pertahanan nonmiliter. Fungsi BKR hanya sebagai penjaga ketertiban rakyat banyak.

Begitu pun ketika BKR diganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat tanggal 5 Oktober 1945. Dimana ia tidak hanya sebagai penjaga ketertiban rakyat banyak semata tapi juga untuk bertempur di medan perang. Sistem pertahanan militer tetap hanya sebagai pelengkap pertahanan nonmiliter. Hal ini karena perjuangan memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya bertumpu pada peran nonmiliter atau melalui diplomasi. Bahkan ketika dalam salah satu diplomasinya harus merugikan sistem pertahanan militer, misalnya Perjanjian Renville dengan penarikan tentara republik dari kantong-kantong wilayah yang dikuasai Belanda dalam perang kemerdekaan, keputusan yang merugikan itu tetap dilakukan.

Dalam perkembangannya sebagai komplemen, militer Indonesia tidak memiliki peran utama dalam kemerdekaan Indonesia. Hal ini karena kemerdekaan Indonesia dilakukan sepenuhnya oleh nonmiliter melalui perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Perjanjian yang sebenarnya sangat merugikan Indonesia diambil karena kesadaran bahwa sistem pertahanan militer yang bertumpu pada militer tidak berdaya melawan Belanda. Ia terbukti tidak mampu melindungi Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dari ditangkap Belanda. Ibukota Indonesia sebagai wilayah terakhir Negara Kesatuan Indonesia bahkan diduduki oleh Belanda.

Nonmiliter sebagai pemegang utama kendali sistem pertahanan militer melihat perjanjian KMB

selain untuk Indonesia merdeka yang diakui dunia, juga melihat sebagai bagian grand strategi untuk memperkuat pertahanan komplemen yaitu militer Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Terbukti kekuatan nonmiliter selanjutnya berhasil menasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia dan kemudian mampu membangun militer Indonesia menjadi Macan Asia dalam kurun yang sangat cepat. Hanya dari tahun 1949-1962, atau dalam kurun waktu 13 tahun saja.

Kuatnya pembangunan persenjataan militer yang dikembangkan dalam sistem pertahanan militer sebagai komplemen sistem pertahanan nonmiliter, menyebabkan Irian Jaya kembali ke pangkuan Indonesia tanpa perlu perang terbuka. Menyadari akan kalahnya kualitas persenjataan militer yang dimilikinya, Belanda menyerah dengan memilih mundur dari Irian Barat. Irian Barat dengan segera kemudian kembali ke pangkuan Indonesia. Kekuatan kemampuan militer yang dimiliki Indonesia hanya dijadikan sebagai bagian alat diplomasi atau bagian dari sistem pertahanan nonmiliter.

Sayangnya kondisi tersebut berubah dratis saat militer bergerak membalik tangan menguasai nonmiliter. Di bawah kekuatan militer selama 32 tahun, dan dengan mengedepankan sistem pertahanan militer, segera sistem pertahanan nonmiliter hanya menjadi komplemen. Sayangnya pengedepanan sistem pertahanan militer ternyata menghasilkan banyak hal yang sangat mengecewakan.

Swastanisasi dari hasil nasionalisasi yang telah dilakukan dengan susah payah oleh nonmiliter, menyebabkan hilangnya kendali negara sebagai yang diamanatkan oleh UUD 1945 terutama pasal 33. Julukan 'Macan Asia' atas prestasi kemampuan memordenisasi persenjataan militer menjadi yang terdepan di Asia, dicabut dengan paksa. Persenjataan militer yang canggih diganti dengan persenjataan KW 3 yang bertumpu pada senjata hibah dari Barat. Sistem persenjataan yang tidak dapat lagi sebagai alat melakukan diplomasi karena tidak memiliki kualitas kuat menangkal musuh, sebagai bagian utama dari sistem pertahanan nonmiliter.

Selain itu, hilangnya karakter yang dibangun oleh nonmiliter sebelumnya dengan menjadikan semua yang berbau asing dianggap hebat. Kisah Hitman marak, dan sejarah 'super' Belanda dan Cina diterima sebagai bagian sejarah bangsa tanpa

melalui tahap penghilangan sisi plastisnya.

Ketika Reformasi mampu menumbangkan Orde Baru, sistem pertahanan militer yang sebelumnya dilakukan kemudian dievaluasi. Sayangnya sistem pertahanan militer yang menjadikan sistem pertahanan nonmiliter sebagai komplemen belum dirubah. Sebagai akibatnya hingga saat ini, efek sebagaimana sebelumnya ada, tetap terjadi.

Secara umum, kekuatan utama sistem pertahanan nonmiliter yang dilakukan pada masa lalu bertumpu pada penebalan nilai kebangsaan, dengan penekanan utama pada konsep Indonesia untuk Indonesia dan Indonesia untuk dunia. Dimana kepentingan untuk Indonesia dalam mengaktualisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia diutamakan. Semua dinilai atas dasar kepentingan Indonesia, termasuk dalam pemilihan unsur-unsur militer yang ada dalam sistem pertahanan militer. Pendekatan yang dilakukan juga dengan menjadikan rakyat sebagai warga negara dan bukan semata-mata sebagai penduduk semata. Dengan dijadikannya rakyat sebagai warga negara, maka rakyat didudukkan untuk berdiri mendukung sistem pertahanan nonmiliter.

Sementara itu ketika kekuatan utama diletakkan pada sistem pertahanan militer, kepentingan ekonomi dan hukum diutamakan. Dimana rakyat dijadikan semata-mata sebagai penduduk yang tidak disertakan dalam mengaktualisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan mudah dapat diusir saat kepentingan ekonomi mengemuka. Pengusiran ini biasa dilakukan melalui proses hukum, sekalipun hukum sebenarnya tidak dapat menyelesaikan segala sesuatu.

2. Adanya Data Yang Perlu Diluruskan

Sekalipun buku ini secara keseluruhan dapat dianggap baik, namun demikian terdapat beberapa data yang perlu diluruskan. Pada kali ini hanya akan ditunjukkan beberapa data saja, yaitu sebagai berikut.

A. Serangan nonmiliter dalam bentuk aksi non kekerasan yang dilancarkan kekuatan global ke Indonesia dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 (ditandai dengan runtuhnya Orde Baru. Hanya dalam hitungan bulan bangsa Indonesia dan NKRI yang pernah mendapat julukan “Macan Asia” yang perkasa berubah,

ibarat menjadi “kucing” yang penurut, yang hampir dalam berbagai bidang kehidupannya bergantung pada negara lain (BAB 1, hal 1).

Data ini kiranya plastis. Hal ini karena kekuatan global yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai “kucing” penurut, yang hampir dalam berbagai bidang kehidupannya bergantung pada negara lain, dimulai dan mencapai puncaknya di era Orde Baru. Era Reformasi hanya melanjutkan era sebelumnya. Julukan “Macan Asia” terjadi bukan di era Orde Baru.

B. Sesungguhnya pada permulaannya pihak RI mempunyai posisi yang lebih kuat di bidang militer, politik, psikologis, dan sosial budaya. Sedangkan Belanda dapat masuk hanya dengan membonceng pada Inggris-Australia dan mula-mula hanya dapat berkuasa dalam kamp-kamp interniran di belakang kawat berduri, pihak Indonesia telah secara *de facto* hampir seluruh Indonesia. Senjata-senjata Jepang yang berhasil direbut cukup untuk beberapa divisi, dan alat-alat produksi telah pula dikuasai (BAB 2 hal. 10).

Data ini tentu tidak tepat dan bertentangan dengan data sebelumnya. Dalam data sebelumnya, A.H. Nasution dalam salah satu pernyataannya menyatakan posisi Indonesia kalah dengan Belanda. Tentara kita pada waktu itu tidak setara dengan pihak agresor dalam hal pengorganisasian, peralatan, dan keahlian (BAN 2 hal. 9). Pernyataan bahwa pihak RI mempunyai posisi yang lebih kuat di bidang militer, politik, psikologis, dan sosial budaya tidak juga didukung kuat dengan data. Misalnya saja dalam pesawat tempur yang dimiliki ketika itu. Pesawat Belanda jauh lebih banyak dan unggul di atas persenjataan pesawat Indonesia saat perang kemerdekaan.

C. Kasus 5.1 Penjelajahan Laksamana Cheng Ho – Penjelajah Muslim dari Tiongkok, (BAB 5, hal. 141-146).

*Memasukkan data Penjelajahan Laksamana Cheng Ho – Penjelajah Muslim dari Tiongkok sebagai bagian dari sejarah sangat menyesatkan. Sekalipun mencantumkan data sumbernya misalnya *Muslimdaily.net.*, Published On: Wed, Aug 12th, 2015, namun data tersebut sangat plastis. Hal ini karena data Penjelajahan*

Laksamana Cheng Ho hanya dicatat dalam Sejarah Dinasti Cina semata.

Sejarah Melayu Klasik, Jawa Kuno dan Jawa Pertengahan, dan Bali Kuno tidak mencatatnya. Kisah ini sangat bertentangan dengan data

*Hikayat Hang Tuah atau Sejarah Melayu. Hal ini menunjukkan jika Penjelajahan Laksamana Cheng Ho hanya berdasar data diplomatis, atau naskah tunggal yang tentu tidak memiliki dukungan kebenaran sejarah.***



Para Penulis

- **A.A. Gede Agung Widharmika** atau biasa dipanggil Widharmika Agung menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Industrial Engineering pada tahun 1999 – 2004. Pada tahun 2008-2010 ia melanjutkan pendidikan ke Harvard University Kennedy School of Government. Gelar yang ia raih adalah Master in Public Administration / International Development, Master in Public Administration / International Development. Widharmika Agung merupakan Co Founder Indorelawan sejak Agustus 2012 dan sebagai Director Capsquare Asia Partners sejak Januari 2015.
- **Ir. Michael Tedja, MT** merupakan pendiri dan Ex Ketua Jurusan Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Bina Nusantara dan kini menjadi dosen di Arsitektur Univ. Bina Nusantara & STT Let's. Michael Tedja aktif dalam kegiatan sosial. Selain sebagai Sekretaris Dewan Pembina Alumni Kolese Kanisius, juga sebagai Ketua Yayasan Komunitas Indonesia Sejati. Pada saat ini, ia juga aktif sebagai Pembicara Pelatihan & Seminar Nasional di Perusahaan/ Universitas. Adapun topik yang biasa dibawakannya adalah: Business Coaching, Advance Supervisor & Management Training, Professional Selling Program, Service Quality, Leadership, Winning Negotiation.
- **Melly Kiong** dilahirkan di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Singkawang. Ia merupakan salah satu ahli parenting dan mengkampanyekan pendidikan rumah dengan nama “Home Education”. Beberapa karya yang menjadi best seller terkait parenting adalah: ‘Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Baik’, ‘Cara Kreatif Mendidik Anak ala Melly Kiong’, serta ‘Guru-Guru Kecil Melly Kiong’. Selain sebagai ahli parenting, Melly Kiong juga seorang praktisi yang mampu mengedepankan praktik di dalam kehidupan sehari-hari.
- **Johanes Herlijanto, M.Si., Ph.D.** adalah salah satu dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan sebagai Lecturer of Hubungan Internasional BINUS University. Gelar sarjananya diraih tahun 1996 dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada bidang Studi China. Gelar masternya diraih dari Universitas Indonesia bidang ilmu Sosiologi. Sementara itu gelar doktor, diraihnya dari Macquarie University, Australia (2012) and Vrije University, the Netherlands (2013). Disertasinya berjudul: ‘Emulating China: Representation of China and the Contemporary Critique of Indonesia’.

- **Prof. Dr. Susanto Zuhdi** merupakan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI). Ia dilahirkan di Banyumas, 04 April 1953. Gelar sarjananya diraih dari Fakultas Sastra UI Jurusan Sejarah pada tahun 1979. Gelar master diraihnya dari Program Studi Sejarah Program Pascasarjana UI tahun 1991. Sementara itu gelar Doktor diraihnya dari Program Pascasarjana UI Program Studi Sejarah tahun 1999. Pada saat ini ia mengajar pada Program Pascasarjana UI Studi Ilmu Sejarah.
- **M Subhan SD** merupakan wartawan senior Kompas. Ia aktif mengisi rubrik politik dan hukum di Harian Kompas. Pada saat ini, ia mendalami masalah konflik, dan sebagai kandidat doktor di FISIP Universitas Indonesia.
- **Pontjo Nugro Susilo Sutowo atau Pontjo Sutowo** dilahirkan di Palembang, 17 Agustus 1950. Ia pernah menempuh pendidikan di ITB Jurusan Mesin. Pontjo Sutowo merupakan salah seorang konglomerat di bidang properti di Indonesia. Pada saat ini, ia menjadi Direktur Utama PT Adiguna Shipyard Jakarta, Direktur PT Nugra Santana, Dirut PT Handara Graha, dan Dirut PT Indobuildco. Di tengah kesibukannya, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Diantaranya sebagai: Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/POLRI (FKPPI) Periode 2015-2020, Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, dan Ketua Aliansi Kebangsaan.
- **Dr. Daoed Joesoef** dilahirkan di Medan, Sumatera Utara, 8 Agustus 1926. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1959, dan meraih dua gelar doktor dalam program Ilmu Keuangan Internasional dan Hubungan Internasional tahun 1967 serta program Ilmu Ekonomi tahun 1973 dari Sorbonne, Perancis. Daoed Joesoef adalah salah seorang pendiri CSIS (Centre for Strategic and International Studies), serta pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dari 1978 sampai 1983 dalam Kabinet Pembangunan III.
- **Iman Sunario** merupakan Sarjana Arsitektur ITB angkatan tahun 1961. Ia telah purna tugas dari pemerintah DKI Jakarta yang bertugas dalam masalah perkotaan, properti dan tata bangunan. Pada tahun 1974, ia mendirikan PT Ateier 6 Arsitek yaitu sebuah biro arsitek ternama di Jakarta, dan menjabat Sek-Jen Real Estate Indonesia pada tahun 1986-1989. Ketika itu, ia bertugas di bidang property. Sejak tanggal 8 April 2009 sampai sekarang, ia menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada ranah budaya.
- **Irawan Djoko Nugroho** dilahirkan di Magelang, 24 November 1968. Pendidikan sarjana diselesaikan di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada dengan spesifikasi bidang Filologi Jawa Kuno tahun 1996. Melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Azzahra Jurusan Ekonomi Syariah (tidak selesai). Semenjak lulus studi, ia aktif bekerja di Bidang Warehouse dan Logistik. Diantaranya di PT. Gajah Tunggal Pethrochem Karawang Divisi Polyester dan PT. KYPJO (Kelsri-Yin-Promits Joint Operation) di Tangguh Papua (Piping Onshore). Sejak tahun 2009, ia aktif bekerja sebagai wartawan dan penulis, dan mulai tahun 2013 hingga sekarang, sebagai Redaktur Pelaksana Majalah Ibadah.



Jurnal Suluh diterbitkan oleh Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) dan dimaksudkan sebagai media informasi kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh YSNB dan Forum Aliansi Kebangsaan. Selain itu, juga sebagai forum pembahasan masalah kebudayaan dan kebangsaan di Indonesia, yang berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesa, dan gagasan orisinil yang kritis dan mencerahkan.

Sekretariat:

The Residence II Lantai 2 The Sultan Hotel Complex.
Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat.
Telp: (021) 5704632 - 33



www.sulunuswantara.or.id



Yayasan Suluh Nuswantara Bakti



@YSNB_Official